



# RENSTRA

(RANCANA STRATEGIS)

**KECAMATAN BEKASI SELATAN**  
TAHUN 2024-2026



RENSTRA KCBS

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

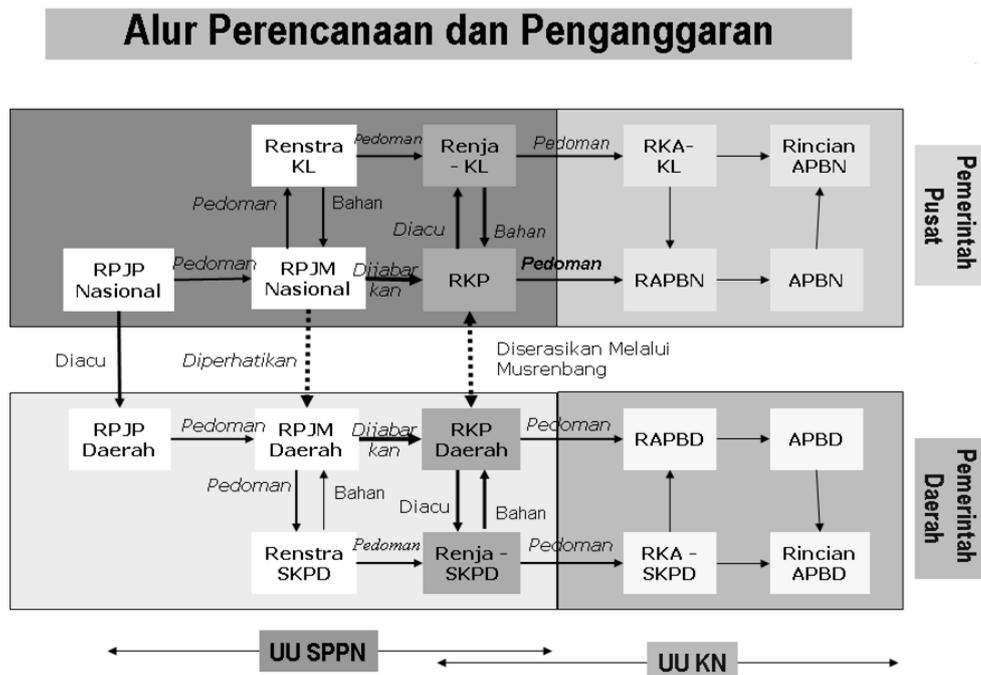
### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari RPD 2024-2026 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5(lima) tahun. RPD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan

kerangka pendanaan. Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategi.



**Gambar 1.1**  
**Alur Perencanaan dan Penganggaran**

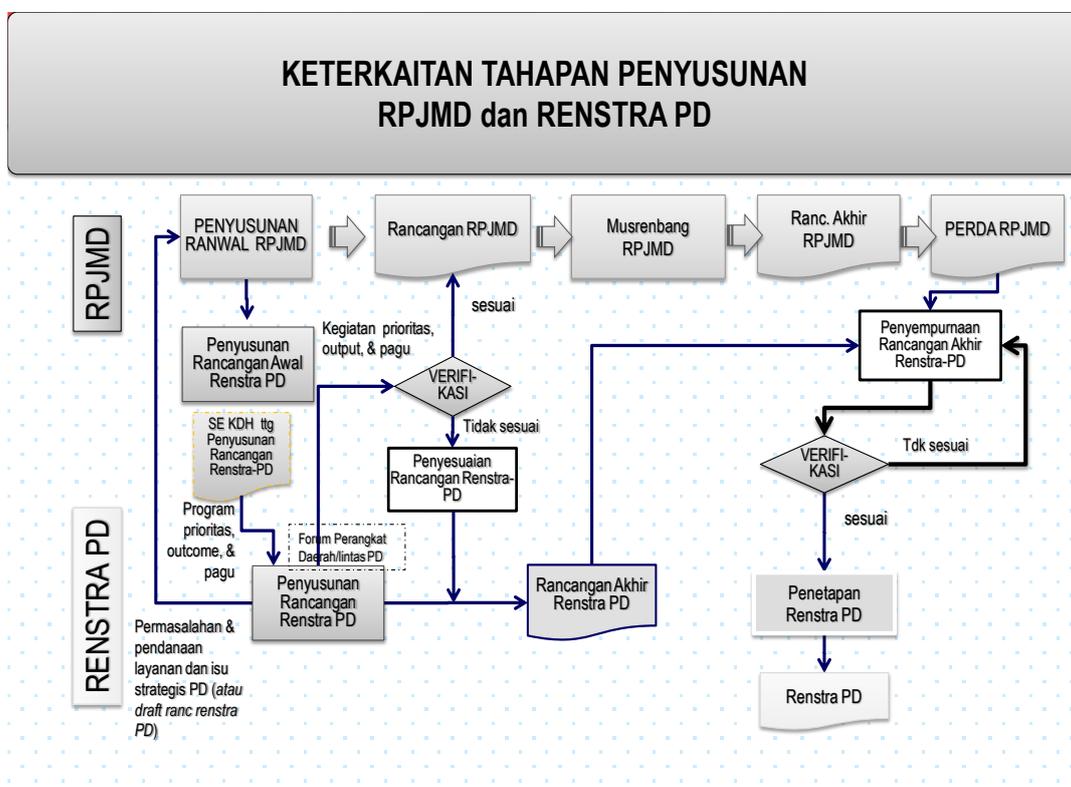
### **Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Selatan dengan RPD**

Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 juga disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RTRW dan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Di samping itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan nan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut.

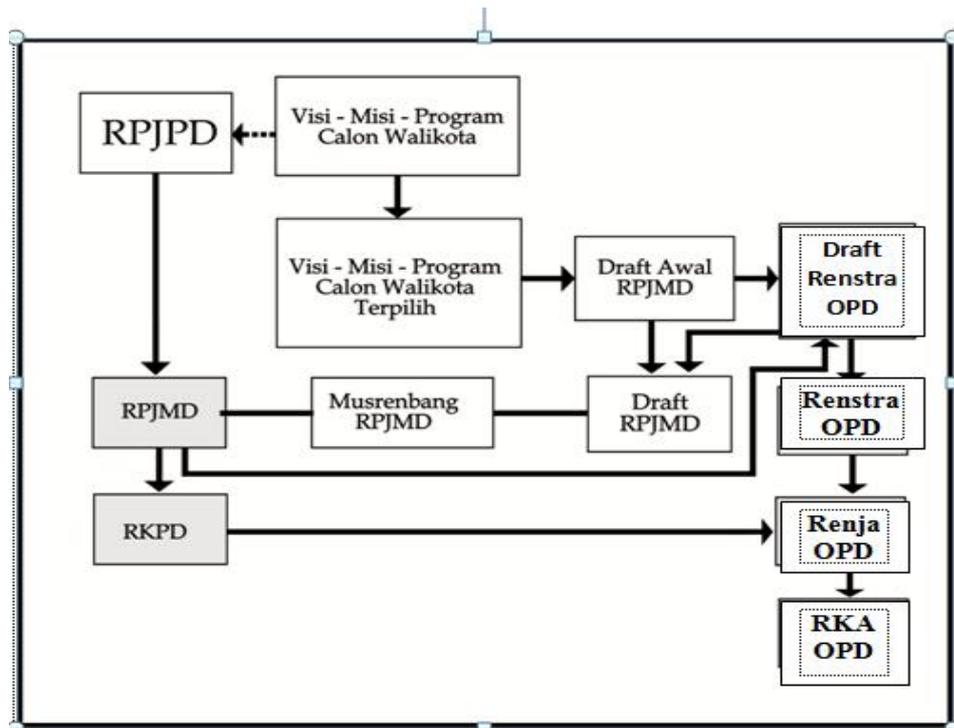
Seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi dengan Kecamatan Bekasi Selatan akan mendapatkan kesempatan, peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi Kota yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan. Serta untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hubungan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.2**  
Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra

Rancangan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan disusun dengan menyempurnakan renstra Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Kecamatan Bekasi Selatan. Dalam mengaplikasikan integritas antara perencanaan dan pelaksanaan dalam dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024-2026 sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung yang akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan dalam kurun waktu tahun 2024-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Hubungan RPD Teknokratis dengan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan adalah bahwa RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum idalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Dengan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.



**Gambar 1.3**  
**Proses Penyusunan RPD dan Penetapan RPD**

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota Renstra Kecamatan Bekasi Selatan berpedoman dalam Rencana Strategis yang dibuat Kemendagri Tahun 2020-2024, sasaran kebijakan dalam Renstra Kemendagri tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Renstra Kecamatan Bekasi Selatan juga memiliki hubungan RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang

diwilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Lingkungan Hidup merupakan Isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2061, Penataan Ruang Kota Bekasi diarahkan untuk penataan ruang Wilayah Kota Bekasi melalui Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selain adanya hubungan dengan RTRW, Renstra Kecamatan Bekasi Selatan juga memiliki hubungan dengan KLHS. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 *Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2016 KLHS masuk dalam penyusunan RPJPD/RPD. Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *selfassessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah dalam

mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atasa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wlikota Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

- n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
- p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
- q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ( Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E)
- r. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 33 Seri E);
- s. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
- t. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan disusun menyesuaikan dengan hasil evaluasi dan kajian ulang (review) Pemerintah Kota Bekasi terhadap target :

1. Mengacu kepada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, menjadi dasar pengecekan dan perimbangan suatu kewenangan atas berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur penyelenggara
2. Perubahan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta penyesuaian terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut.

pemerintahan tingkat Kecamatan dan seluruh komponen masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi dan misi yang ingin dicapai Pemerintah Kota Bekasi.

## **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2018 - 2023 ditujukan untuk :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Bekasi Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2018- 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Membahas secara ringkas tentang latar belakang penyusunan rencana strategis, penjabaran landasan hukum, yang menjadi pedoman acuan dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan Bekasi Selatan, penjelasan maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan rencana strategis.

**BAB II            GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Sumber Daya, tugas dan fungsi, Kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan.

**BAB III           PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Mengemukakan permasalahan - permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan , telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan rencana dan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV           TUJUAN DAN SASARAN**

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Kecamatan Bekasi Selatan serta implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

(RPD) Kecamatan Bekasi Selatan.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bekasi Selatan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota BEKASI sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Memuat penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Membahas penjabaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

**BAB VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bekasi Selatan disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan pada kurun waktu 5 Tahun kedepan yaitu Tahun 2018 -2023.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Selatan .**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan diwilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Keputusan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. serta

didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat .
3. Seksi Kesejahteraan Sosial menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial
4. Seksi Ekonomi Pembangunan menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan
5. Seksi Keamanan Ketertiban menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat kecamatan .
- b. Pengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengoordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan
- d. Pengoordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan
- e. Pengoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Pengoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan.
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan .
- j. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan

- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Adapun, Struktur Organisasi Kecamatan Bekasi Selatan terdiri dari:

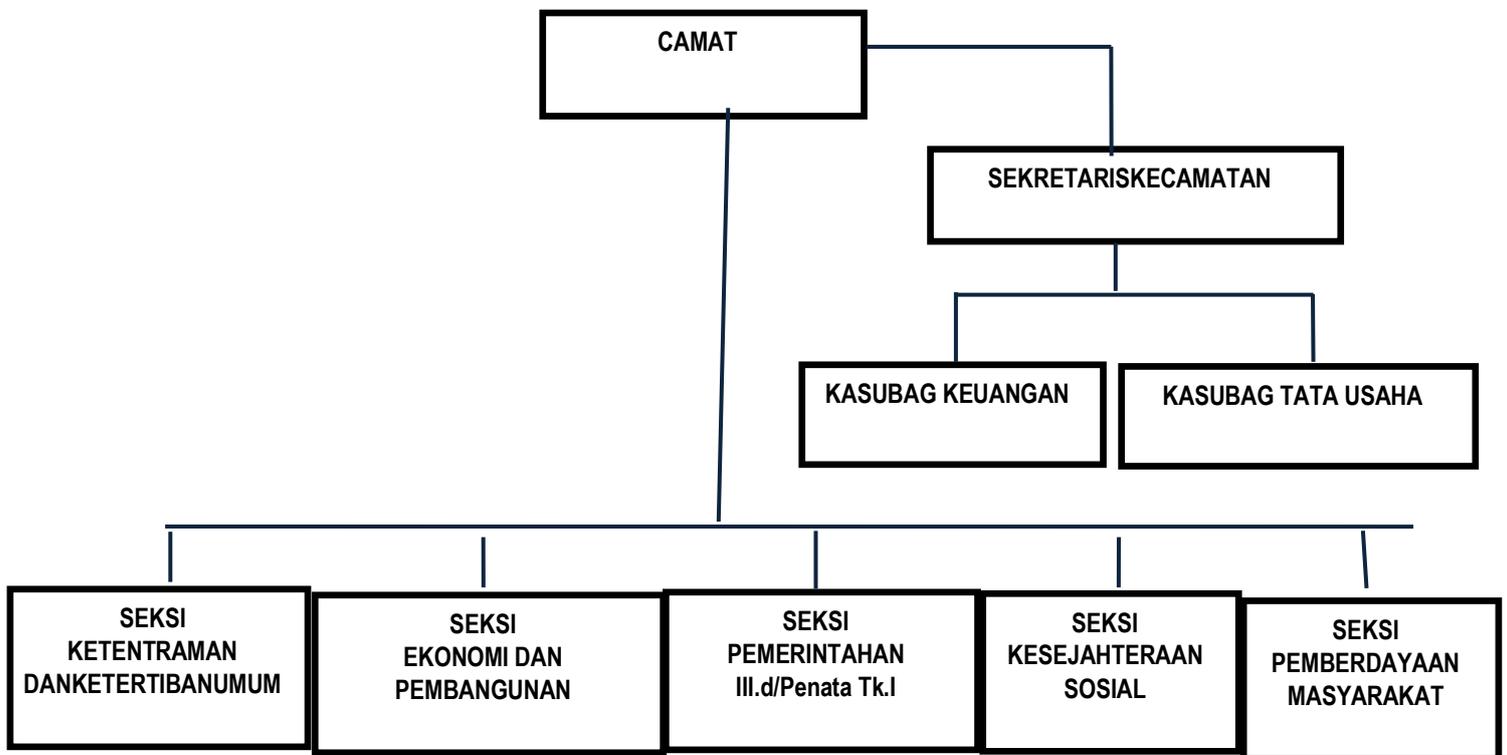
**a. Camat**

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Camat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- k. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BEKASI SELATAN**



Kecamatan Bekasi Selatan mempunyai 5 Kelurahan yang dibentuk sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman dengan Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang diangkat oleh Wali Kota dan bertanggungjawab kepada Camat.

Berdasar Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 93 Tahun 2016, susunan organisasi kelurahan terdiri atas:

1. Lurah;
2. Sekretariat;

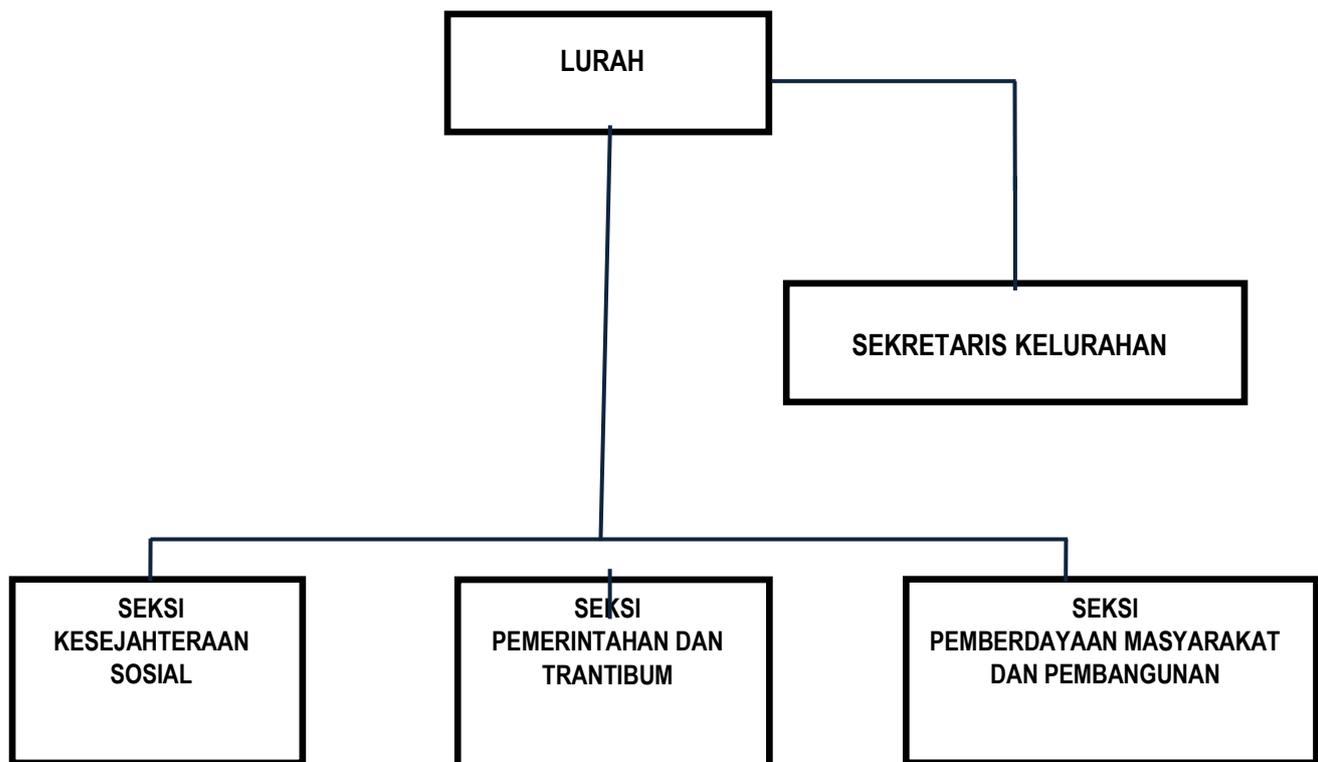
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
6. Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan.

Adapun Kelurahan yang berada di Kecamatan Bekasi Selatan adalah:

1. Kelurahan Margajaya;
2. Kelurahan Kayuringinjaya;
3. Kelurahan Pekayonjaya;
4. Kelurahan Jakasetia;
5. Kelurahan Jakamulya.

Perwal Kota Bekasi 93 TAHUN 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kota Bekasi.

#### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN**



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bekasi Selatan.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan yang mempunyai 5 (lima) Kelurahan didukung oleh sebanyak 218 orang pegawai, terdiri dari 68 orang pegawai tetap (PNS), 150 orang pegawai non PNS Ditinjau dari tingkat pendidikan, SDM (PNS) Kecamatan Bekasi Selatan Secara kuantitas aparatur Kecamatan Bekasi Selatan sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana Teknik Sipil dan Sarjana Statistik. Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya Pada Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan terdistribusi:

**Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Selatan  
Berdasarkan Jenis Kelamin  
Perbulan Januari Tahun 2022**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PEGAWAI NEGERI	58	41	17
2	TENAGA KONTRAK	180	108	72
	<b>TOTAL</b>	<b>238</b>	<b>134</b>	<b>80</b>

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bekasi Selatan

**Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Selatan  
Berdasarkan Pendidikan  
Perbulan Januari 2022**

N O	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	58	-	11	28	-	16	2	1
2	TENAGA KONTRAK	180	-	-	54	18	106	2	-
	<b>TOTAL</b>	<b>238</b>		<b>11</b>	<b>82</b>	<b>18</b>	<b>98</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bekasi Selatan

**Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Selatan  
Berdasarkan Golongan  
Perbulan April Januari 2021**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI	58	3	40	15	2
2	TENAGA KONTRAK	180	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>214</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bekasi Selatan

Adapun Daftar Nominatif Pejabat Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi kondisi Tahun awal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bekasi Selatan

No	Eselon			Pendidikan			pangkat		
	Nama	Jml		Tingkat	Jml		Gol	Jml	
		L	P		L	P		L	P
1.	<b>Camat</b>	1	-	S2	1	-	IV/b	1	
2	<b>Sekcam</b>	-	1	S2	-	1	IV/a	-	1
3	<b>Kasi Kecamatan</b>	5	-	S2	1	-	IV/a	2	-
				S1	3	-	III/d	1	-
				SMA	1	-	III/c	-	2
4		1	1	S1	1	1	III/c	1	1
5	<b>Subag Lurah</b>	4	1	S2	2	-	III/d	3	-
				S1	-	3	III/c	1	-
6		4	1	S2	1	-	III/c	1	1
	<b>Sekkel</b>			S1	3	1	III/b	3	-
7		10	5	S2	1		III/d	1	2
	<b>Kasi Kelurahan</b>			S1	9	1	III/c	5	3
						4	III/b	4	-
Jumlah		<b>25</b>	<b>9</b>	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>Jml</b>	<b>24</b>	<b>10</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami

peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan.

#### **Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bekasi Selatan**

NO	JENIS BARANG / NAMA	MERK / MODEL	JUMLAH BARANG / REGISTER  X	KEADAAN BARANG		
				B	KB	RB
1	2	3	7	9	10	11
		CAMAT				
1	AC	Sharp Plasma Cluster 2pk	1	√		
2	Televisi	LG	2	√		
4	Meja 1 Biro	-	1	√		
5	Kursi Pejabat	Chairman	1	√		
		No Merk	1	√		
6	Lemari Besi 2 Pintu	Brother	1	√		
7	Papan Tulis	-	1	√		
8	Papan Struktur Organisasi	-	1	√		
9	Lambang Garuda	-	1	√		
10	Foto Presiden dan Wakil Presiden	-	1	√		

11	Foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota	-	1	√		
12	Filling Cabinet Besi 4 Laci	Datascrip	1	√		
13	Lemari Kaca	Lemari piala / piagam	2	√		
14	Sofa	Morres 3 Dudukan	1	√		
		Morres 2 Dudukan	1	√		
		SEKRETARIS KECAMATAN				
1	AC	Akari	1	√		
2	Meja 1 Biro	Innola	1	√		
3	Kursi Staff	-	1	√		
4	Sofa	2 Dudukan	1	√		
		PELAYANAN				
1	AC	Sharp	2	√		
2	Televisi	Sharp	1	√		
4	Mesin Finger Print	Solution	1	√		
5	Telepon	Panasonic	1	√		
6	Lemari Kayu Arsip	-	1	√		
		TATA USAHA				
1	AC	Sharp	1	√		
2	PC Unit	Acer	1	√		
		HP	1	√		
		Axioo	1	√		
		Asus	1	√		
3	Printer	Canon Pixma G3010	1	√		
		HP Laser Jet P1102	1	√		
		HP Laser Jet Pro M12w	1	√		
4	Laptop	Compaq	1	√		
5	Kursi Staff	Innola	1	√		
			1	√		
		Ichiko	1	√		
		No Merk	1	√		

		Elite	1	√		
6	Meja 1/2 Biro	Innola	1	√		
		No Merk	1	√		
			2	√		
7	Filling Cabinet Besi 4 Laci	Datascrip	1	√		
		PENDOPO				
1	Meja 1/2 Biro	No Merk	1	√		
			1		√	
2	Kursi tunggu 3 dudukan	No Merk	1			√
		Informa	1	√		
3	Kursi tunggu 4 dudukan	Chairman	1	√		
		No Merk	3			√
		Acero	1			√
		PERPUSTAKAAN				
1	Meja 1/2 Biro	No Merk	1	√		
					√	
2	Rak buku			√		
		PKK				
1	Sofa	1 Set	1	√		
2	Papan Tulis	-	1	√		
3	Kursi Staff	-	1	√		
			1	√		
4	Lemari Besi 2 Pintu Slide	Elite	1	√		
5	Lemari Kayu 2 Pintu	-	1	√		
6	Lemari Kayu 4 Pintu	-	1	√		
7	AC	Panasonic	1	√		
		RUANG TENGAH				
1	Meja 1/2 Biro	Elite	5	√		
		Innola	2	√		
			2	√		
		No Merk	1	√		

2	Kursi Staff	-	1	√		
			2	√		
3	Lemari Besi 2 Pintu	Elite	1	√		
		Frontline	1	√		
		Brother	1	√		
4	Lemari Besi Kaca 2 Pintu	Frontline	3	√		
5	AC	Sharp	1	√		
6	Lemari Kayu Arsip	Kotak kecil	1	√		
7	Lemari Kayu Arsip	2 Pintu	2	√		
		RUANG KERJA GUDANG				
1	Penghancur Kertas	Secure	1			√
2	PC Unit	Axioo	1			√
		Acer	1	√		
		HP	1	√		
3	Printer	Canon Pixma G3010	1	√		
		Laser Jet Pro M102a	2		√	
		Laser Jet P1102	1		√	
			1			√
4	Mesin Tik Elektrik	Epson	1	√		
5	Meja 1/2 Biro	Innola	1	√		
		No Merk	2	√		
			1		√	
6	Kursi Staff	Innola	1	√		
			2	√		
8	Lemari Besi 2 Pintu	Datascrip	1	√		
		Frontline	1	√		
		Brother	1	√		
9	Rak Arsip Besi 5 Tingkat	-	1	√		
10	Lemari Kayu Arsip	-	1	√		
11	Filling Cabinet Besi 4 Laci	Datascrip	1	√		

12	Sound System	Voice One	1			
13	Laptop	HP	1	√		
		HP	1			√
		Lenovo	1	√		
14	Kamera	Cannon	1	√		
15	Wireless	Bob Audio	1	√		
16	Wireless	Xelulont	1	√		
17	Wireless Microphone System	Shure	1	√		
18	Kipas Angin	Sekai	1	√		
19	Dispenser	Miyako	1	√		
20	Layar Film / Projector	D'Ligth	1	√		
21	Camera Video	Canon EOS 600D	1			√
22	Megaphone / Toa	-	6	√		
23	Mixer	Soundcraft	1	√		
		PPAT				
1	AC	Sharp	1	√		
2	PC Unit	LG	1	√		
3	Printer	Canon	1	√		
		Epson L1300	1	√		
		Laser Jet P1102	1	√		
4	Mesin Tik Manual	-	1	√		
5	Mesin Tik Elektrik	Brother	1	√		
6	Kursi Staff	No Merk	2	√		
7	Meja 1/2 Biro	No Merk	1	√		
			4	√		
8	Lemari Besi 2 Pintu	Frontline	1	√		
		Lufo	1	√		
9	Rak Arsip Besi 5 Tingkat	-	5	√		
10	Laptop	HP	1	√		
		PEMERINTAHAN				
1	AC	Sharp	1	√		

2	PC Unit	Acer	1	√		
		HP	1	√		
		Lenovo	1	√		
3	Printer	Canon Pixma G3010	1	√		
4	Meja 1/2 Biro	Elite	1	√		
		No Merk	3	√		
5	Kursi Staff	Innola	1	√		
		No Merk	1	√		
6	Meja Kerja	Elite	1	√		
		No Merk	3	√		
7	Meja Rapat	-	1	√		
8	Lemari Besi 2 Pintu	VIP	1	√		
9	Filling Cabinet Besi 4 Laci	Datascrip	2	√		
		Lufo	1	√		
			1	√		
10	Foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota	-	1	√		
11	Layar Pintar	-	1	√		
12	Mesin Penghancur Kertas	Secure	1	√		
13	Rak Arsip Besi 5 Tingkat	-	1	√		
		KEPENDUDUKAN				
1	AC	Sharp	1	√		
2	Printer	Laser Jet P1102	1	√		
3	Kursi Tunggu 3 Dudukan	-	1	√		
4	Meja 1/2 Biro	No Merk	2	√		
			1	√		
			4	√		
		KEUANGAN				
1	AC	Sharp	1	√		
2	PC Unit	Acer	1	√		
		Axioo	1	√		
		LG	1	√		

3	Printer	Canon Pixma G3010	1	√		
		Canon Pixma G2010	1	√		
		Laser Jet P1102	1	√		
			1	√		
4	Mesin Tik Elektrik	Epson	1	√		
5	Meja 1/2 Biro	Elite	1	√		
		No Merk	3	√		
6	Kursi Staff	Innola	3	√		
		No Merk	3	√		
7	Meja 1/2 Biro	Elite	1	√		
		Innola	1	√		
		No Merk	1	√		
			1	√		
			4	√		
8	Lemari Besi 2 Pintu	Elite	1	√		
9	Rak Arsip Besi 5 Tingkat	-	1	√		
10	Filling Cabinet Besi 4 Laci	Datascrip	2	√		
		Elite	1	√		
11	Laptop	Asus	1	√		
		EKONOMI PEMBANGUNAN				
1	AC	Sharp	1	√		
2	PC Unit	Axioo	1	√		
		Hp	1	√		
3	Printer	Epson L565	1	√		
		Hp Office Jet 7612	1	√		
4	Lemari Besi 2 Pintu	Lufo	1	√		
5	Meja 1/2 Biro	Innola	1	√		
		Panel	1	√		
		No Merk	1	√		
6	Kursi Kerja	No Merk	1	√		
			1	√		

7	Mesin Tik Manual	No Merk	1	√		
8	Laptop	Asus	1	√		
9	Kamera	Canon DSLR	1	√		
10	Dispenser	Miyako	1	√		
11	Kipas Angin	Cosmos	1	√		
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	PC Unit	Compaq	1	√		
		HP	1	√		
2	Printer	Laser Jet P1102	1	√		
3	Meja 1/2 Biro	-	1	√		
			1	√		
4	Kursi Staff	-	1	√		
			1	√		
5	Lemari Besi 2 Pintu	Datascrip	1	√		
6	Lemari Kayu Arsip	-	1	√		
7	Filling Cabinet Besi 4 Laci	Elite	1	√		
		Lion	1	√		
8	AC	Sharp	1	√		
		KESEJAHTERAAN SOSIAL				
1	AC	Sharp	1	√		
2	PC Unit	Acer	1	√		
		Hp	1	√		
3	Printer	Canon Pixma G3010	1	√		
		Laser Jet P1002	1	√		
4	Lemari Besi 2 Pintu	Datascrip	1	√		
5	Filling Cabinet 4 Laci	Elite	1	√		
			1	√		
5	Meja 1/2 Biro	Innola	1	√		
		No Merk	2	√		
6	Kursi Kerja	Innola	1	√		

		No Merk	1	√		
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	AC	Aux	1	√		
2	PC Unit	Acer	1	√		
3	Printer	Canon Pixma G3010	1	√		
4	Lemari Besi 2 Pintu	Datascrip	1	√		
5	Lemari Besi Kaca 2 Pintu	Frontline	1	√		
6	Filling Cabinet 4 Laci	Elite	1	√		
		Lufo	1	√		
7	Meja 1/2 Biro	Elite	1	√		
		Innola	1	√		
		No Merk	1	√		
			2	√		
8	Megaphone / Toa	No Merk	1	√		
9	Kursi Kerja	Innola	1	√		
			1	√		
		RUANG SATPOL				
1	Air Conditioner	Akari	1	√		
2	Meja 1/2 Biro	No Merk	1	√		
3	Kursi Staff	Innola	1	√		
4	Filling Cabinet Besi 4 Laci	Elite	1	√		
5	Kipas Angin	Maspion	1	√		
6	Televisi					
6	Dispenser	Sharp	1	√		
7	Finger Print	-	1	√		

Sumber: Data KIP Kecamatan Bekasi Selatan th. 2020

\*B(Baik) & TB(Tidak Baik)

### 2.2.3 Tata Laksana Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Bekasi Selatan memiliki standar dalam pelayanan yang ada, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses dalam pelayanan tersebut.

Berikut merupakan SOP pelayanan yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan :

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) KECAMATAN BEKASI SELATAN						
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN		MUTU BAKU		
		KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a		[ ]	Fomulir Permohonan dari kelurahan	5 Menit	Dokumen lengkap
	b		↓	1 Pengantar RT/RW 2 Formulir permohonan KK dari Kelurahan 3 KTP dan Kartu Keluarga Lama 4 Surat Keterangan Pindah bagi Pendatang 5 Surat Nikah bagi yang baru berkeluarga 6 Akta Kelahiran Anak untuk Penambahan jiwa 7 Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian (Untuk yang kehilangan KTP) 8 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	30 Menit	Tercatat dalam register dokumen, dan KTP tercetak
2	Menerima dan memaraf pengantar permohonan KK yang sudah tercetak	[ ]	←	KK Tercetak	3 Menit	KK diparaf
3	Menyerahkan KK yang sudah di paraf ke Pendudukan untuk di Tanda Tangan oleh Kadisduk Capil		↓	KK yang sudah di paraf dikirim ke Disdukcapil untuk ditandatangani	1 Hari	KK yang sudah di paraf dikirim ke Disduk untuk di Tanda Tangan
4	Menerima info, mengambil KK yang sudah di cetak ke Disdukcapil, menandatangani tanda terima dan melaporkan kepada Kasi Pemerintahan		(A) ↓ (A) ↓ [ ]	Tanda terima KK	1 Jam	KK sudah di Tanda Tangan Kadisdukcapil
5	Kasi Pemerintahan mengecek dan memerintahkan pelaksana untuk menginfokan ke kelurahan untuk mengambil dan mendistribusikan kepada pemohon	[ ]	←	KK yang sudah di Tanda Tangan Kadisdukcapil diambil oleh pihak kelurahan dan di distribusikan ke pemohon	Relatif	KK diterima oleh pemohon

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR AKTA KELAHIRAN KECAMATAN BEKASI SELATAN							
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN			MUTU BAKU		
		CAMAT	KASI	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a			[ ]	Fomulir Permohonan	5 Menit	
	b			↓	1 Pengantar RT/RW 2 Formulir permohonan Akta Lahir dari Kelurahan 3 FC KTP Suami Isteri FC Kartu Keluarga 4 FC Surat Nikah 5 Surat Keterangan Lahir dari Bidan atau 6 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Meneliti dan memaraf formulir permohonan akta kelahiran		[ ]	←	Permohonan akta kelahiran yang telah diregister	11 Menit	Permohonan akta kelahiran diparaf
3	Menandatangani pengantar akta kelahiran	[ ]	↓	↓	Permohonan akta kelahiran diparaf		pengantar akta kelahiran diketahui Camat
4	Formulir pengantar akta kelahiran yang telah di tandatangani diterima pemohon			↓ [ ]	Pengantar Akta kelahiran ditandatangani Lurah dan Camat	3 Menit	dan akan diproses ke Disdukcapil untuk pencetakan Akta kelahiran

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERAKAMAN KTP ELEKTRONIK / e-KTP KECAMATAN BEKASI SELATAN						
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN		MUTU BAKU		
		KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a			Dokumen lengkap	5 Menit	Dokumen lengkap
	b		 ↓  ↓  ↓ 	1 Pengantar RT/RW 2 KTP atau KK 3 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	15 Menit	Hasil Perekaman Data diri dikirim melalui Jaringan Satelit untuk proses pencetakan e-KTP oleh pihak Kemendagri
2	Menerima e-KTP yang telah jadi untuk didata sesuai dengan jumlah yang ada di konsorium		 ↓ 	KTP el yang sudah tercetak	30 Menit	Konsorium/ tanda terima pengiriman
3	Penandatanganan Tandaterima Konsorium dari Kemendagri			Konsorium/ tandaterima pengiriman	30 Menit	Konsorium/ tanda terima pengiriman yang telah di tandatangani
4	Menyerahkan E-ktip ke Kelurahan untuk didistribusikan ke pemohon melalui RT/RW			KTP el yang sudah tercetak	5 menit	Tanda terima / berita acara kasi pemerintahan Kelurahan

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA/PERUSAHAAN								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI EKBANG	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
	b				 ↓ 	1 Pengantar RT/RW 2 Foto copy KTP Pemohon 3 Akte Pendirian Perusahaan 4 Foto copy PBB Tahun Berjalan 5 Ijin tetangga bagi usaha dengan resiko tinggi	20 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Memeriksa Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU yang Sudah dibuat/diCetak berikut Kelengkapannya dan di bubuhkan paraf					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan dan dokumen lengkap	5 menit	SKDU terparaf Kasi ekbang
3	Berkas SKDU yang sudah diparaf kasi ekbang kecamatan diajukan ke sekretaris kecamatan untuk dibubuhkan paraf kembali					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan dan dokumen lengkap	5 Menit	SKDU terparaf Sekcam
4	Menerima Berkas Domisili Usaha dan memberi Tanda Tangan					Berkas SKDU paraf Kasi Ekbang dan Sekcam	5 Menit	SKDU telah ditanda tangan Camat
5	Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan akan di Register arsip dan diberikan kembali kepada pemohon					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan yang sudah diketahui / ditanda tangani dan di register	5 Menit	Surat Keterangan Domisili Usaha di terima Pemohon (d lanjutkan untuk pengurusan Perijinan selanjutnya)

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) KECAMATAN BEKASI SELATAN							
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a				1 KTP 2 KK	5 Menit	Surat Masuk
	b				1 Fotocopy KTP, KK 2 Pengantar dari RT, Rw 3 Pengantar dari Puskesmas 4 Surat Rekomendasi Kelurahan (SKTM)	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan penerbitan surat pengesahan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang telah ditandatangani lurah setempat, jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana				Dokumen pemohon	3 Menit	SKTM Terparaf Kasi Kesos
3	Memaraf SKTM yang telah diparaf kasi Kesos				Dokumen permohonan/SKTM lengkap terparaf Kasi Kesos	3 Menit	SKTM Terparaf Sekcam
4	Menandatangani SKTM yang telah diparaf kasi Kesos dan Sekcam				SKTM yang sudah di paraf	3 Menit	SKTM
5	Menerima, mendaftarkan, mengarsipkan dan memberikan kepada pemohon				Tertandatangani Camat	4 Menit	SKTM diterima pemohon

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN							
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI EKBANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	a					5 Menit	Berkas Persyaratan Pengurusan Izin
	b						
	c						
2	a				1 Foto copy KTP Pemohon	20 Menit	Dokumen permohonan lengkap dan Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Peta Situasi Tercetak
	b				2 Foto copy Sertifikat Kepemilikan Tanah 3 Foto copy PBB Tahun Berjalan 4 Rekomendasi IPPL (UPTD PBFB) 5 Gambar Rencana Bangunan (UPTD PBFB) 6 Izin Peruntukan Penggunaan Lahan		
3	Memeriksa dan menandatangani BA dan gambar bangunan, memerintahkan pelaksana untuk mempersiapkan nota perhitungan dan mencetak draf IMB				SSPD	1 Hari	Tanda Terima Pembayaran Pajak
4	a. Menyiapkan nota perhitungan dan draf IMB b. Menerima bukti pembayaran retribusi IMB dari pemohon				Bukti Pembayaran	5 Menit	Tanda Lunas Pembayaran Pajak
5	Memeriksa dan memaraf draf IMB				Dokumen permohonan lengkap	10 Menit	Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terparaf dan Gambar Rencana Bangunan serta Peta situasi Tertanda tangan
6	Memeriksa dan memaraf draf IMB				Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diparaf kasi Ekbang	5 Menit	Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terparaf
7	Memeriksa dan menandatangani draf IMB				Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diparaf kasi Ekbang dan Sekcam	5 Menit	Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertandatangani dan Gambar Rencana Bangunan Tertanda tangan
8	Memberi Nomor IMB, menyampaikan kepada pemohon mengarsipkan IMB				Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Gambar Rencana Bangunan serta Peta situasi Tertanda tangan dari teregister Arsip disesuaikan dengan kewenangan IMB	5 Menit	Izin Mendirikan Bangunan

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PERMOHONAN PERALIHAN HAK TANAH KECAMATAN BEKASI SELATAN							
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN		MUTU BAKU			
		CAMAT/PPAT	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a				Kelengkapan Berkas permohonan	10 Menit	Tercetak Dokumen Akta Peralihan Hak Tanah dan Pajak penjual, pajak pembeli
	b				1 Foto Copy KTP Suami dan Istri 2 Foto Copy KK 3 Surat Bukti Kepemilikan Tanah 4 SPPT PBB 10 Tahun terakhir lunas dibayar 5 Foto Copy KTP Pembeli 6 Foto Copy NPWP Penjual dan Pembeli 7 Surat Pernyataan Ahli Waris 8 Surat Kematian Penjual (bila meninggal)	10 Menit	
2	Menerima Akta dengan kelengkapan tandatangan yang dibutuhkan serta melampirkan bukti pembayaran Pajak penjual dan pembeli				Dokumen Jelas dan Lengkap	10 Menit	Dokumen Jelas dan Lengkap serta bukti pembayaran pajak
3	Menandatangani Akta Peralihan Hak Tanah						

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT DOMISILI YAYASAN, KLINIK, DAN SEKOLAH (PA'UD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA) KECAMATAN BEKASI SELATAN								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		OUTPUT
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	a					Fomulir Permohonan	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
	b					1 Pengantar RT/RW 2 Fotocopy KTP 3 Surat Akta Pendirian 4 Surat Akta Notaris 5 Ijin Tetangga 6 Surat Kepemilikan/Status Tanah 7 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB 8 Rekomendasi Dari lembaga Terkait 9 Surat Domisili dari	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menelaah permohonan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah yang telah ditandatangani Lurah setempat jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah terparaf
3	Pemarafan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Dokumen pemohon lengkap	3 Menit	Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah terparaf
4	Penandatanganan, Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Rekomendasi telah di paraf	3 Menit	Rekomendasi telah ditandatangani
5	Menerima, meregister, mengarsipkannya Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah dan memberikannya kepada pemohon					Dokumen diberikan kepada Pemohon	4 Menit	Rekom diterima untuk diproses lebih lanjut ke Dinas terkait

URAIAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN ( SKCK) KECAMATAN BEKASI SELATAN								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		OUTPUT
		CAMAT	SEKCAM	KASI TRAMTIB	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	a					Fomulir Permohonan Dari Kelurahan (Surat Pengantar)	30 Menit	Dokumen permohonan lengkap
	b					1: Foto Copy KTP 2: Foto Copy KK 3: Pengantar RT, Rw / Kelurahan	10 Menit	Dokumen permohonan lengkap
2	Menerima dan memberi paraf pada Surat Pengantar SKCK yang telah ditandatangani Lurah setempat, jika tidak sama / disetujui maka dikembalikan ke pelaksana jika disetujui maka di paraf					Dokumen pemohon dengan tandatangan Lurah Setempat pada Surat Pengantar SKCK	10 Menit	Surat Pengantar SKCK telah di paraf Kasi Tramtib
3	Menerima dan memberi paraf pada Surat Pengantar SKCK, yang telah diparaf Kasi Tramtib					Dokumen Lengkap	5 Menit	Surat Pengantar SKCK telah di paraf Sekcam
4	Menerima dan memberi Tandatangan pada Surat Pengantar SKCK, yang telah di paraf kasi tramtib dan Sekcam					Dokumen Lengkap	5 Menit	Surat Pengantar SKCK telah ditandatangani Camat
5	Menerima, memberi nomor Registrasi, Mengarsipkannya dan memberi Surat pengantar SKCK kepada pemohon					Surat pengantar SKCK Tandatangan Camat	4 Menit	SKCK yang telah ditrima oleh pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kapolsek / Kapoltres

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam **strategic planning** suatu organisasi. Sedangkan pengukuran

kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan selama 5 (lima) Tahun dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut

## 2.31 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Selatan**  
**Kota Bekasi**

NO	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra OPD			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	70	72,5	75	76,03	76,42	NA	108,6%	105,4%	NA
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	Nilai	81	81,5	82	81,82	81,62	NA	101,0%	100,1%	NA
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan	%	60%	60%	60%	60%	NA	NA	100,0%	NA	NA
4	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	%	68%	72%	84%	68%	NA	NA	100,0%	NA	NA

Dari tabel diatas terdapat 3 indikator kinerja yang terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Persentase wilayah tertib K3 dimana untuk masing-masing indikator telah mempunyai target, dari ketiga indikator diatas, indikator peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang masih rendah untuk pencapaian target tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan ilmu teknologi yang menjadi salah satu program pelayanan paten. Untuk indikator peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada saat ini masyarakat telah serta ikut berpartisipasi dalam membangun wilayah diantaranya adanya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di wilayah masing-masing, dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat lebih aktif. Sedangkan untuk indikator wilayah tertib K3 telah didapat kesempurnaan 100% karena di harapkan masyarakat mau ikut serta dalam menjaga lingkungan wilayah masing-masing.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada Tahun 2015-2018 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi TA. 2021**

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Akhir Tahun	
		I		II		III		IV			
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
<b>Kecamatan Bekasi Selatan</b>											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.745.088.00 0	0	3.411.927.41 3	0	5.061.864.00 3	72,7 5	4.783.656.97 2	12,2 5	6.222.904.64 9	85,0 1	19.480.353.03 7



Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Akhir Tahun	
		I		II		III		IV		%	Rp
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.804.690.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.566.543</b>	<b>0</b>	<b>1.838.530.298</b>	<b>72,92</b>	<b>2.021.690.161</b>	<b>16,44</b>	<b>3.099.493.601</b>	<b>89,36</b>	<b>8.180.280.603</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.226.000	0	32.488.293	0	37.029.448	288	38.652.111	96	44.602.339	384	152.772.191
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.595.464.000	0	1.188.078.250	0	1.801.500.850	1.395	1.983.038.050	155	3.054.891.262	1.550	8.027.508.412
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>507.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.970.000</b>	<b>0</b>	<b>44.337.000</b>	<b>85,19</b>	<b>228.720.000</b>	<b>13,33</b>	<b>46.790.400</b>	<b>98,52</b>	<b>331.817.400</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000	0	0	0	33.167.000	34	30.090.000	9	23.920.400	43	87.177.400
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.000.000	0	11.970.000	0	11.170.000	40	9.630.000	10	22.870.000	50	55.640.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000	0	0	0	0	1.250	189.000.000	0	0	1.250	189.000.000
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>39.324.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>26,65</b>	<b>0</b>	<b>41,91</b>	<b>11.506.000</b>	<b>68,56</b>	<b>27.506.000</b>
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>16.499.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>16.000.000</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	16.499.500	0	0	0	16.000.000	9	0	3	0	12	16.000.000
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>22.825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,47</b>	<b>0</b>	<b>50,37</b>	<b>11.506.000</b>	<b>52,84</b>	<b>11.506.000</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.825.000	0	0	0	0	4	0	81,6	11.506.000	85,6	11.506.000
		0		0		0		0		0	

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Akhir Tahun	
		I		II		III		IV		%	Rp
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>324.489.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.938.000</b>	<b>68,75</b>	<b>3.684.000</b>	<b>31,25</b>	<b>70.363.200</b>	<b>100</b>	<b>83.985.200</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>9.290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.290.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9.290.000</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.290.000	0	0	0	9.290.000	6	0	0	0	6	9.290.000
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>315.199.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.000</b>	<b>58,33</b>	<b>3.684.000</b>	<b>41,67</b>	<b>70.363.200</b>	<b>100</b>	<b>74.695.200</b>
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	305.199.800	0	0	0	648.000	9	324.000	3	70.363.200	12	71.335.200
Evaluasi Kelurahan	10.000.000	0	0	0	0	0	3.360.000	100	0	100	3.360.000
<b>Kelurahan Jakasetia</b>											
<b>Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>87.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>37.310.000</b>	<b>100</b>	<b>37.310.000</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>87.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>37.310.000</b>	<b>100</b>	<b>37.310.000</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	87.500.000	0	0	0	0	3	0	9	37.310.000	12	37.310.000
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>21.989.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>8.619.650</b>	<b>0</b>	<b>5.370.650</b>	<b>75</b>	<b>13.990.300</b>
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>21.989.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>8.619.650</b>	<b>0</b>	<b>5.370.650</b>	<b>75</b>	<b>13.990.300</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	21.989.650	0	0	0	0	18	8.619.650	0	5.370.650	18	13.990.300



Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Akhir Tahun	
		I		II		III		IV		%	Rp
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		
<b>Kelurahan Pekayonjaya</b>											
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	18.760.250	0	0	0	0	38,89	10.115.800	11,11	6.334.000	50	16.449.800
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	18.760.250	0	0	0	0	38,89	10.115.800	11,11	6.334.000	50	16.449.800
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	18.760.250	0	0	0	0	0	10.115.800	0	6.334.000	0	16.449.800
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	1.536.557.200	0	0	0	406.220.800	75	30.002.400	0	875.015.599	75	1.311.238.799
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	1.536.557.200	0	0	0	406.220.800	75	30.002.400	0	875.015.599	75	1.311.238.799
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.536.557.200	0	0	0	406.220.800	9	30.002.400	0	875.015.599	9	1.311.238.799
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kelurahan Kayuringinjaya</b>											
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	26.702.300	0	0	0	0	73,21	8.178.300	0	7.743.300	73,21	15.921.600
<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	26.702.300	0	0	0	0	73,21	8.178.300	0	7.743.300	73,21	15.921.600
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	26.702.300	0	0	0	0	18	8.178.300	0	7.743.300	18	15.921.600



**Tabel 2.4.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi TA. 2022**

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Akhir Tahun (TW III)	
		I		II		III		IV		%	Rp
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		
Kecamatan Bekasi Selatan											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.363.727.356	22,3	3.433.338.669	30,88	6.090.705.560	16,11	5.552.794.335			69,29	15.076.838.564
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	8.000.000	25	0	25	0	50	0			100	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	1	0	1	0	2	0			4	0
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	11.175.972.000	12,7	1.853.756.952	17,86	2.921.126.925	17,86	2.991.320.215			48,41	7.766.204.092
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.165.972.000	171	1.853.756.952	228	2.921.126.925	228	2.991.320.215			627	7.766.204.092
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	0	0	0	0	0	0			0	0
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	5.000.000	0	0	0	0	0	0			0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	0	0	0	0	0	0			0	0
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	433.000.000	34,61	0	35,84	327.016.000	7,63	17.600.300			78,08	344.616.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	0	0	600	24.888.000	0	0			600	24.888.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	246.500.000	6.100	0	57	225.369.300	227	3.977.000			6.384	229.346.300
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.500.000	1.787	0	0	56.758.700	0	9.405.300			1.787	66.164.000
		10.500		10.500		10.500				31.500	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	220	0	220	10.920.000	220	4.218.000			660	15.138.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	0	0	0	810.000	0	0			0	810.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.000.000	0	0	50	8.270.000	0	0			50	8.270.000

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Akhir Tahun (TW III)	
		I		II		III		IV		%	Rp
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100.000.000	0	0	45	45.000.000	0	0			45	45.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	0	0	9	45.000.000	0	0			9	45.000.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	10.101.755.356	19,36	1.579.581.717	25,09	2.451.789.839	16,75	2.450.185.700			61,2	6.481.557.256
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.148.600	95	45.977.967	97	55.222.294	97	64.493.590			289	165.693.851
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.731.606.756	14	1.533.603.750	21	2.396.567.545	0	2.385.692.110			35	6.315.863.405
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	540.000.000	20,65	0	41,98	345.772.796	28,72	93.688.120			91,35	439.460.916
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	1	0	0	12.524.696	1	16.619.920			2	29.144.616
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.000.000	8	0	12	52.168.100	15	60.348.200			35	112.516.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.000.000	7	0	20	43.087.000	15	16.720.000			42	59.807.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	238.000.000	0	0	3	237.993.000	0	0			3	237.993.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100.000.000	12,5	0	55,36	91.341.000	19,64	0			87,5	91.341.000
<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	20.000.000	25	0	25	13.241.000	25	0			75	13.241.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	3	0	3	13.241.000	3	0			9	13.241.000
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	80.000.000	0	0	85,71	78.100.000	14,29	0			100	78.100.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80.000.000	0	0	6	78.100.000	1	0			7	78.100.000

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Akhir Tahun (TW III)	
		I		II		III		IV		%	Rp
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	575.000.000	25	53.070.000	21,88	54.370.000	37,5	97.996.000			84,38	205.436.000
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>475.000.000</i>	<i>33,33</i>	<i>53.070.000</i>	<i>29,17</i>	<i>54.370.000</i>	<i>16,67</i>	<i>97.996.000</i>			<i>79,17</i>	<i>205.436.000</i>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000	6	53.070.000	0	3.050.000	0	0			6	56.120.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	315.000.000	1	0	0	51.320.000	0	70.516.000			1	121.836.000
Evaluasi Kelurahan	40.000.000	0	0	6	0	0	27.480.000			6	27.480.000
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>100.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>			<i>100</i>	<i>0</i>
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100.000.000	0	0	0	0	2	0			2	0
		0		0		100				100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60.000.000	26,67	0	33,33	13.847.000	26,67	30.317.000			86,67	44.164.000
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>60.000.000</i>	<i>26,67</i>	<i>0</i>	<i>33,33</i>	<i>13.847.000</i>	<i>26,67</i>	<i>30.317.000</i>			<i>86,67</i>	<i>44.164.000</i>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.000.000	8	0	10	13.847.000	8	30.317.000			26	44.164.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	21,43	0	28,57	6.344.000	21,43	2.684.000			71,43	9.028.000
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>40.000.000</i>	<i>21,43</i>	<i>0</i>	<i>28,57</i>	<i>6.344.000</i>	<i>21,43</i>	<i>2.684.000</i>			<i>71,43</i>	<i>9.028.000</i>
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000	3	0	4	6.344.000	3	2.684.000			10	9.028.000
Kelurahan Jakasetia											
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000	25	0	25	11.151.200	25	2.036.000			75	13.187.200
<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>20.000.000</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>11.151.200</i>	<i>25</i>	<i>2.036.000</i>			<i>75</i>	<i>13.187.200</i>

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Akhir Tahun (TW III)	
		I		II		III		IV		%	Rp
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	3	0	3	11.151.200	3	2.036.000			9	13.187.200
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.202.777.600	25	0	25	296.483.599	20,83	29.994.800			70,83	326.478.399
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>1.182.777.600</i>	25	0	25	296.483.599	20	29.994.800			70	326.478.399
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.182.777.600	3	0	3	296.483.599	0	29.994.800			6	326.478.399
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>20.000.000</i>	25	0	25	0	25	0			75	0
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakamulya	20.000.000	3	0	3	0	3	0			9	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000	25	0	25	14.436.000	25	0			75	14.436.000
<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>20.000.000</i>	25	0	25	14.436.000	25	0			75	14.436.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	3	0	3	14.436.000	3	0			9	14.436.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.024.834.400	25	0	25	327.843.999	25	41.978.000			75	369.821.999
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>1.004.834.400</i>	25	0	25	327.843.999	25	41.978.000			75	369.821.999
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.004.834.400	3	0	3	327.843.999	3	41.978.000			9	369.821.999
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>20.000.000</i>	25	0	25	0	25	0			75	0
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pekayonjaya	20.000.000	3	0	3	0	3	0			9	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000	25	0	25	0	25	9.520.000			75	9.520.000
<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>20.000.000</i>	25	0	25	0	25	9.520.000			75	9.520.000

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Akhir Tahun (TW III)	
		I		II		III		IV		%	Rp
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	3	0	3	0	3	9.520.000			9	9.520.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.566.268.800	25	0	25	367.912.799	25	78.234.400			75	446.147.199
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>1.546.268.800</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>367.912.799</i>	<i>25</i>	<i>72.984.400</i>			<i>75</i>	<i>440.897.199</i>
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.546.268.800	3	0	3	367.912.799	3	72.984.400			9	440.897.199
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>20.000.000</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>5.250.000</i>			<i>75</i>	<i>5.250.000</i>
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuringinjaya	20.000.000	3	0	3	0	3	5.250.000			9	5.250.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000	25	0	25	11.775.000	25	2.650.000			75	14.425.000
<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>20.000.000</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>11.775.000</i>	<i>25</i>	<i>2.650.000</i>			<i>75</i>	<i>14.425.000</i>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	3	0	3	11.775.000	3	2.650.000			9	14.425.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.840.692.800	25	0	25	469.994.000	25	474.514.799			75	944.508.799
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>1.820.692.800</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>469.994.000</i>	<i>25</i>	<i>474.514.799</i>			<i>75</i>	<i>944.508.799</i>
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.820.692.800	3	0	3	469.994.000	3	474.514.799			9	944.508.799
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>20.000.000</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>0</i>			<i>75</i>	<i>0</i>
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Margajaya	20.000.000	3	0	3	0	3	0			9	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20.000.000	25	0	25	0	25	4.476.000			75	4.476.000
<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>20.000.000</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>4.476.000</i>			<i>75</i>	<i>4.476.000</i>

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja Triwulan								Realisasi Akhir Tahun (TW III)	
		I		II		III		IV		%	Rp
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	3	0	3	0	3	4.476.000			9	4.476.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	483.544.000	25	0	25	106.050.000	25	114.044.000			75	220.094.000
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>463.544.000</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>106.050.000</i>	<i>25</i>	<i>114.044.000</i>			<i>75</i>	<i>220.094.000</i>
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	463.544.000	3	0	3	106.050.000	3	114.044.000			9	220.094.000
<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>20.000.000</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>0</i>			<i>75</i>	<i>0</i>
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	3	0	3	0	3	0			9	0

**URAIAN DARI PENCAPAIAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN,  
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BEKASI SELATAN  
KOTA BEKASI**

Program dengan rasio penyerapan terendah adalah di program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Diperlukan strategi yang baik untuk dapat menyerap anggaran tersebut secara efektif dan efisien. Kecamatan Bekasi Selatan telah menginisiasi jadwal terkait kegiatan yang ada di program tersebut, seperti perawatan kendaraan dinas, perawatan gedung kantor, taman, dan lain-lain.

Dibawah ini adalah Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2021 dan Tahun 2022 beserta analisis pelayanan yang targetnya tercapai faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja tersebut baik faktor penghambat maupun faktor lainnya, sebagai berikut :

**Capaian Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan  
Kota Bekasi Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sesuaitugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra OPD		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	70	72,5	76,03	76,42
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	81	81,5	81,82	81,62
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan	%	60%	60%	60%	NA
Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	%	68%	72%	68%	NA

didukung oleh kohesi sosial yang kuat						
---	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas terdapat Perbandingan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan sebagai berikut :

1. Untuk indikator **Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan** Pada Tahun 2021 realisasinya sebesar 76.03 dengan capaian rasio sebesar 108.6% sehingga capaian target pada tahun 2019 tercapai dan melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan Pada Tahun 2020 realisasinya sama dengan tahun 2019 sebesar 66% dengan capaian rasio sebesar 110 sehingga capaian target pada tahun 2020 tercapai dan melampaui target yang ditetapkan serta masuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil perhitungan persentase capaian terhadap indikator yang pertama, dapat dikatakan melebihi target. Secara umum pencapaian kinerja keberhasilan peningkatan capaian di Kecamatan Bekasi Selatan didukung oleh beberapa hal diantaranya

- a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat berperan aktif dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan;
- b. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Kecamatan Bekasi Selatan dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
- c. Monitoring secara berkala terhadap capaian sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
- d. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan yang diampu Kecamatan sehingga terdapat peran masyarakat dalam peningkatan ;
- e. Peran serta kelurahan sebagai unit terkecil dari struktur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terus dievaluasi kinerjanya sehingga dapat mendorong peningkatan ;
- f. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2020;

- g. Adanya lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, Posyandu, PKK, LPM dll yang dijadikan subjek kegiatan di Kecamatan Bekasi Selatan juga mendorong peningkatan capaian .

Walaupun mayoritas capaian meningkat, namun dalam implementasi upayanya masih terdapat faktor penghambat, antara lain :

- a. Belum optimalnya informasi mengenai pengurusan IMB yang menjadi wewenang Kecamatan Bekasi Selatan, DPMPTSP dan Distaru sehingga warga masih sulit membedakan mengurus kemana IMB tersebut. Upaya yang akan dilakukan dalam menyelesaikan hambatan ini yaitu dengan membuat SOP Pengurusan IMB serta daftar jenis IMB apa saja yang dapat dilayani di kecamatan. Selain itu akan dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT dan RW agar memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan IMB;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya meningkatkan capaian seperti sarana dan prasarana dalam kepengurusan e-KTP dan Akte Kelahiran mengingat Kecamatan Bekasi Selatan dibatasi hanya sebagai fasilitator dalam mengurus dokumen tersebut. Sementara wewenang urusannya masih dimiliki Disdukcasip Kota Bekasi. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan menguatkan sinergitas serta peran operator Disdukcasip yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan sehingga tidak ada gap antara petugas *front office* kecamatan dengan operator Disdukcasip;
- c. Data monografi baik kelurahan maupun kecamatan masih belum optimal sehingga sulit memetakan potensi peningkatan PAD terutama dari sektor PBB. Upaya yang akan dilakukan adalah pemetaan PBB bermasalah yang selalu keluar setiap tahunnya. Selain itu, perlu adanya koreksi berjenjang oleh pimpinan agar data monografi yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan dapat selalu terbaharui dan berkualitas baik;
- d. Adanya dua kegiatan yang hampir serupa namun berbeda peruntukannya yaitu P3BK dan Peningkatan Sarana dan Prasarana menyebabkan kegiatan P3BK tidak dilaksanakan tahun ini sehingga peningkatan capaian Rumah Layak Huni tidak signifikan Upaya yang

akan dilakukan adalah pemetaan tujuan dari kegiatan yang hampir sama sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tumpang tindih dan pencapaian dapat terwujud.

2. Untuk indikator ***Indeks Kepuasan Masyarakat*** Pada Tahun 2019 realisasi rasio capaian sebesar 103.5% melebihi dari target yang ditentukan sehingga capaian target pada tahun 2019 tercapai dan melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi nya sebesar 79.35% capaiannya sebesar 98.57% hal tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian sekitar 5% dari tahun sebelumnya sehingga capaian target pada tahun 2020 tidak tercapai dikarenakan efek dari pandemic wabah Covid-19 dimana pada saat awalawal muncul Wabah COvid-19 pelayanan di Kecamatan Bekasi Selatan dibatasi sesuai dengan Protokol Kesehatan. Selain itu banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pelayanan di Kecamatan Bekasi Selatan tetap melayani kegiatan pelayanan public sesuai dengan jadwal sehingga jumlah pelayanan mengalami penurunan selain karena Pandemi juga karena tidak ketahuan masyarakat tentang adanya pelayanan di Kecamatan Bekasi Selatan. Dari kualitas feedback masukan masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan mayoritas mendapatkan informasi dari Media Sosial hal tersebut perlu kita tingkatkan untuka mengakomodir feedback feedback dari mayarakat yang masih belum tanggap teknologi yang rencananya nanti akan di siapkan kotak saran yang lebih memadai di setiap meja pelayanan baik di Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Bekasi Selatan.

Keberhasilan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang nilainya memang tidak mencapai target tahun 2020, akan tetapi didukung oleh beberapa hal diantaranya

- a. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang sudah memadai; Digunakannya pendopo Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang cukup besar sebagai tempat untuk menunggu antrian dirasakan masyarakat sangat nyaman. Desain loket pelayanan juga menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan.
- b. Waktu pelayanan yang singkat;

Kemudahan persyaratan kepada masyarakat mendorong pelayanan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Masyarakat yang datang ke Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi akan dilayani dalam waktu yang telah ditetapkan dalam SOP Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Sehingga saat masyarakat mengambil kembali hasil produk layanan tersebut sudah selesai.

- c. Terdapat sarana pengaduan dan permohonan informasi;

Berkembangnya teknologi dan informasi saat ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi. Hal ini dimanfaatkan oleh Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan. Saat ini Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi memiliki beberapa kanal pengaduan maupun permohonan informasi secara online seperti *Instagram, Facebook, Twitter dan Website*. Selain itu, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi juga memiliki sarana kotak pengaduan yang ditempatkan di dekat Loker Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

- d. Implementasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) yang menjadi program Kemendagri;

Program PATEN yang telah diterapkan di seluruh Indonesia memberi manfaat yang banyak di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Kini masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi tidak perlu bingung dalam mendapatkan pelayanan. Dengan datang ke loket pelayanan, warga masyarakat akan diarahkan ke seksi dimana masyarakat tersebut akan mengurus dokumen perijinan maupun non perijinan.

- e. Optimalisasi peran Satgas Pamor dalam melakukan pelayanan *door to door* ke masyarakat.

Program pemerintah Kota Bekasi dalam pelayanan jemput bola ke warga dengan memaksimalkan peran Satgas Pamor. Setiap RW di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi memiliki 1 orang satgas pamor yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada warga. Jika warga kesulitan baik jarak maupun waktu, Satgas Pamor Kecamatan

Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan sigap membantu mengurus dokumen ke Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam implementasi upayanya masih terdapat **faktor penghambat**, antara lain :

- a. Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan SOP Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sehingga masyarakat masih sulit mengakses persyaratan yang ditentukan. Upaya yang akan dilakukan adalah pemutakhiran SOP terkait pelayanan dengan Bagian Organisasi Setda sehingga SOP di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dapat disosialisasikan ke masyarakat yang akan melakukan permohonan pelayanan;
- b. Terdapat perbedaan kebijakan antar satu kecamatan dengan kecamatan lain sehingga masyarakat akan membandingkan pelayanan di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan kecamatan lainnya. Upaya yang akan dilakukan adalah penyeragaman kebijakan dasar dalam pelayanan seperti waktu pelayanan, syarat dan biaya dengan kecamatan lain. Karena dasar hukum dalam pelayanan di Kota Bekasi menggunakan Perda dan Perwal yang sama;
- c. Tidak dilakukannya sosialisasi perubahan kebijakan secara optimal sehingga sering terjadi keterlambatan informasi kepada petugas *Front Office (FO)*. Upaya yang akan dilakukan adalah pembinaan secara berkala kepada petugas FO dengan mengundang narasumber dari dinas teknis terkait yang pelayanannya bersinggungan langsung dengan kecamatan.

3. Untuk indikator ***Presentase Peningkatan Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan*** Pada Tahun 2019 realisasi capaiannya sebesar 116% sedangkan pada tahun 2020 capaian realisasinya sebesar 68.18% hal tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian rasio sebesar 10% dari Tahun sebelumnya dikarenakan dikarenakan masa pademi Covid-19 akan tetapi walaupun rasio capaiannya menurun dari tahun

sebelumnya tetapi realisasinya tetap melampaui target di tahun 2020 dan dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja tercapai dengan baik.

Berdasarkan capaian indikator ketiga zona tertib K3 sesuai target yang direncanakan. **Faktor Keberhasilan realisasi** Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang nilainya sesuai target didukung oleh beberapa hal diantaranya :

a. Giat bersih lingkungan yang rutin dilakukan;

Sepanjang tahun 2020, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi melakukan giat bersih lingkungan di wilayah. Namun, dalam sebulan terdapat jadwal yang difokuskan untuk membersihkan dan menertibkan lingkungan Kantor. Perwujudan keberhasilan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dalam mewujudkan K3 dimulai dari wilayah yang sangat internal yaitu kantor. Selain itu, sejalan dengan pengurusan administrasi kependudukan yang saat ini dapat dilakukan di kecamatan, maka faktor kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kantor juga dapat mendorong kenaikan kepuasan masyarakat.

a. Sinergitas dengan 3 pilar serta Satpol PP dalam rangka penertiban;

Menjaga lingkungan agar tetap tertib dan aman juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Sinergitas 3 pilar dengan Polsek dan Koramil Bekasi Selatan serta Satpol PP dilakukan mengingat dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan aman masing-masing institusi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Penertiban bangunan liar, reklame serta melaksanakan penindakan secara cepat terhadap pelanggaran ketertiban dan keamanan juga dapat dilakukan karena adanya sinergitas. Penertiban di kantor kecamatan dan kelurahan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran baik di dalam maupun sekitar kantor.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian indikator tersebut adalah adanya upaya yang lebih dan peran serta masyarakat yang lebih dalam mendukung giat bersih lingkungan dan penertiban. Karena mulai Tahun 2020 wilayah target sudah masuk ke jalan-jalan utama yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

Dalam mencapai kinerja indikator sasaran kedua tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan 1 (satu) indikator program yaitu Persentase Wilayah Tertib K3. Berikut pencapaian indikator program:

1. Persentase Wilayah Tertib K3

Indikator program ini ditunjang oleh 2 (Dua) kegiatan yaitu Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Persentase Wilayah Tertib K3 berbanding lurus dengan indikator sasaran.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan.**

Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kota BEKASI 2018-2023 dan Kecamatan Bekasi Selatan akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Kecamatan Bekasi Selatan.

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Selatan kedepan antara lain:

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam

menuntut pelayanan public yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.

#### **2.4.2 Peluang**

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representative dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan system fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
5. Adanya Perda tentang Sotaker Kecamatan yang ditindaklanjuti Perwal nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen kantor Kecamatan Bekasi Selatan.

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota Renstra Kecamatan Bekasi Selatan berpedoman dalam Rencana Strategis yang dibuat Kemendagri Tahun 2015-2019, sasaran kebijakan dalam Renstra Kemendagri tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik di Lingkungan Kecamatan Bekasi selatan, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019 memuat pokok-pokok yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Selatan dengan ditanda tangannya hal-hal berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa;
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Selalu meningkatkan fasilitas/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas dan lansia);
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan disediakan ruang bagi masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti

pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

Dalam perencanaan Strategis ini perlu dilakukan analisa untuk menentukan rencana yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mempertahankan hal-hal yang sudah tercapai. Analisa yang komprehensif disemua bidang diperlukan. Kecamatan Bekasi Selatan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)

**a) Analisa SWOT**

- 1) Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman.
- 2) Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi.
- 3) Adanya SOP sesuai ketugasan.
- 4) Adanya semangat kerja/ etos kerja yang memadahi.
- 5) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- 6) Lingkungan kerja yang kondusif.
- 7) Adanya asset tanah dan gedung/ kantor yang cukup representatif.
- 8) Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan.
- 9) Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Kelemahan**

- 1) Jumlah personil yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
- 2) Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan.
- 3) Sarana dan prasarana instansi kurang memadahi sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada

masyarakat.

- 4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
- 5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
- 6) Belum adanya pejabat fungsional, sesuai struktur organisasi Kecamatan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

### **Peluang**

- 1) Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
- 2) Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi / kelembagaan di wilayah.
- 3) Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan/wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat.
- 4) Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif.
- 5) Adanya fasilitas wisata, pendidikan, belanja, sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll.
- 6) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
- 7) Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).

### **Ancaman**

- 1) Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
- 2) Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.

## **b) Faktor Kunci Keberhasilan**

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat di identifikasikan berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kapasitas instansi
- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
- 3) Adanya kepercayaan kepada Birokrat
- 4) Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
- 7) Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BEKASI SELATAN**

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan

Berdasarkan Perda Kota Bekasi nomor: 7 Tahun 2016, Kecamatan Bekasi Selatan terbentuk, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota nomor: 92 Tahun 2016, Kedudukan, Susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan di Kota Bekasi diatur. Tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan ditujukan untuk menyelesaikan dan meminimalisir terjadinya permasalahan di wilayah kerja.

Permasalahan di Kecamatan Bekasi Selatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal merupakan permasalahan yang timbul dari dalam organisasi, sementara eksternal merupakan permasalahan yang timbul dari luar organisasi. Berikut pemetaan permasalahan yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan yang tertuang pada tabel TB-35

Tabel TB-35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	Sarana dan Prasarana eksisting yang sudah	Sarana dan Prasarana penunjang belum tersedia	Sarana dan prasarana belum lengkap

	usang atau belum tersedia		
2	Permohonan permintaan ASN atau pendidikan sesuai tugas dan fungsi belum terpenuhi	Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/ pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya	ASN dengan kemampuan teknis belum optimal
3	Pembangunan Infrastruktur dan Aspirasi Masyarakat yang Belum Terakomodir Seluruhnya.	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan	Minat Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan Masih Rendah.
4	Belum tersedianya data utama sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Setiap leading sektor mempunyai data sendiri yang berbeda-beda (contoh: BPS, Dukcapil, KPU, dll)	Belum tersedianya data valid terkait demografi di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan
5	Kurangnya fasilitas pengembangan ekonomi masyarakat	Masih banyak warga miskin di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Ketimpangan kondisi ekonomi warga di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan

6	Bantuan operasional yang cenderung lambat ter distribusikan	Pelayanan yang dilaksanakan pokmas (contoh:posyandu, pkk, rt, rw) belum optimal	Belum optimalnya pokmas di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan
7	Selain karena wilayah kelurahan Jakasetia bersebelahan dengan kali Bekasi, juga karena masih banyak sampah yang belum terkelola	Masih adanya titik banjir di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pembuangan sampah dan pengelolaannya
8	Intensitas sinergitas forkopimcam yang masih kurang	Kurang optimalnya pemetaan potensi masalah	Potensi adanya konflik di masyarakat
9	Intensitas penyuluhan wawasan kebangsaan yang kurang	Kurangnya pemahaman tentang kewarganegaraan dan pengamalan pancasila	Potensi paham radikalisme
10	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang seharusnya telah mengatur mengenai	Bangunan Liar dan PKL masih sulit dikendalikan meskipun telah dilakukan upaya penanganan/eksekusi oleh aparatur Kecamatan (Trantib), Kelurahan dan Satpol PP Adanya Penyalahgunaan Lahan PSU di wilayah	Masih adanya bangunan liar spanduk liar dan Pedangan Kaki Lima (PKL) di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

sanksi belum dapat ditegakkan sesuai klausul yang telah tertuang.	Kecamatan Bekasi Selatan	
---	--------------------------	--

Terdapat beberapa factor yang menjadi concern Kecamatan Bekasi Selatan untuk membenahi organisasi,

a) Faktor organisasi sturktur organisasi

Apabila pemerintahan memiliki pembagian kerja yang sesuai kebutuhan. Memiliki SOP yang jelas untuk tiap jenis pelayanannya. Serta penerapan desentralisasi yang bertanggungjawab sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan fleksibel. Tentu dapat menunjang kualitas pelayanan publik.

b) Faktor Aparat/ pelayan publik

Sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan aparatur pemerintah ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik pemerintah. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparat sebagai sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengelolaan SDM. Pemerintah dapat menggunakan aplikasi pengelolaan SDM. Semua proses pengelolaan mulai dari pendataan data pegawai, mutase, kehadiran pegawai, hingga penggajian dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.

c) Faktor sistem pelayanan publik

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbang pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Guna memberikan pelayanan yang lebih baik. Saat ini pelayanan publik banyak yang diintegrasikan menjadi satu pintu. Beberapa kota di Indonesia mulai memanfaatkan sistem informasi manajemen perizinan terpadu guna mendukung pelayanan satu pintu. Sistem informasi yang lebih dikenal dengan e-government ini dapat mendukung penyelenggaraan layanan menjadi lebih jelas, mudah, dan transparan. Ketika pemerintah menerapkan pelayanan publik yang baik, maka tidak hanya masyarakat yang merasa terbantu. Namun kinerja pemerintah juga akan semakin efektif dan efisien. Proses yang biasanya berbelit dan lama menjadi lebih efisien. Dari sisi pemerintah, data yang masuk terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi rujukan dikemudian hari. Penerapan teknologi dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

d) Motivasi Kerja Birokrasi dan aparatur;

Motivasi aparatur dalam melayani masyarakat sangatlah penting. Rasa ikhlas dalam melayani, murah senyum, tidak pamrih. Begitu juga dengan birokrasi yang saat ini masih sedikit bertele-tele. Kecamatan Bekasi Selatan berkomitmen untuk ikut mensukseskan target Kota Bekasi yang akan mengusung teknologi informasi untuk efektif dan efisiensi pelayanan. Dengan hadirnya teknologi informasi akan mempercepat dan adanya transparansi dalam pelayanan di Kota Bekasi pada umumnya dan Kecamatan Bekasi Selatan pada khususnya.

e) Kemampuan aparatur;

Kecakapan aparatur sangat berperan dalam efektif dan efisien dalam pelayanan. Kecamatan Bekasi Selatan. Dengan kecakapan aparatur yang bagus maka pengambilan keputusan akan cepat dan tepat. Hal ini juga mengurangi rasio kesalahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

f) Pengawasan/Kontrol Sosial;

Disatu sisi, kontrol terhadap lingkungan juga penting. Memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang produk pelayanan yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan. Syarat, Waktu proses, SOP, dll.

g) Perilaku birokrasi/aparatur;

Perilaku aparatur dalam hal ini disiplin, akan memberikan efek yang bagus untuk kualitas pelayanan. Disiplin waktu, melakukan pelayanan dijam yang telah ditentukan. Disiplin data, menerima dan mengarsipkan data-data pendukung untuk kemudahan akses di lain hari. Serta disiplin diri, dimana semua aparatur harus disiplin dalam hal apapun baik di lingkungan kerja ataupun diluar lingkungan kerja.

h) Komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi serta iklim komunikasi organisasi dan aliran informasi;

Komunikasi adalah kunci dalam hal apapun. Kesalahan kecil dalam komunikasi dapat berdampak fatal terhadap kondisi setelahnya. Komunikasi vertikal kepada atasan ataupun bawahan, dan komunikasi horisontal antar aparatur sangat penting untuk koordinasi di dalam lingkungan kerja. Disposisi harus tepat tujuan, agar segera ditindak lanjuti dengan baik oleh pihak terkait.

i) Restrukturisasi organisasi.

Berhubungan dengan faktor-faktor sebelumnya, jika ada aparatur yang dianggap kurang kompeten, akan ada evaluasi. Kecamatan Bekasi Selatan mendorong aparatur untuk menguasai materi-materi yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat di kawasan Kecamatan Bekasi Selatan. Akan ada mapping berdasar kemampuan dan passion dari aparatur Kecamatan Bekasi Selatan.

## 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Jawa Barat

### 3.2.1 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Tabel 3.4

#### Sasaran Kementrian Dalam Negeri Periode 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		
			2020	2024	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.	1	Indeks Demokrasi Indonesia.	77,36	78,66
		2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilukada dan Pemilu.	77,5% Pilkada	79,5% Pemilu sesuai RPJMN
		3	Indeks Kinerja Ormas.	-*	Nilai 70
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.	1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,1	67,5
		3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target	
				2020	2024
		4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,310	Nilai 2,330
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional.	1	Indeks Kewaspadaan Nasional.	.*	64
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.	1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	.*	150 daerah
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	.*	Nilai 60
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.	1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%	80%
		2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	Nilai 3	Nilai 3,60
6	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian	1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	.*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	1	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	.*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
		3	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	30%	100%
		4	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	.*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
		5	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desar kategori nilai "Baik"	10%	75%
		6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 37
		7	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	.*	36%
		8	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	55 Daerah	165 Daerah
		9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	Nilai 80	Nilai 100
		10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	.*	Nilai (90) A
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		2	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif).	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.	1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	.*	Nilai 60
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	85,01	93,01
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1	Indeks Pengawasan Internal.	Nilai 80	Nilai 100
		2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	Nilai 80	Nilai 85
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil	1	Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan	40%	65%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2020	2024
	penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	masuk kebijakan Kementerian Dalam Negeri.		

Renstra Kemendagri Th.2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Selatan dengan ditandatanganinya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai- nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/ pelayanan public agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan disediakan ruang bagi masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu

- beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 ,penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi :

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;

- j. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari :
  - (1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi :
    - a. sistem pusat pelayanan kota;
    - b. sistem jaringan prasarana kota.
  - (2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budi daya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budi daya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruangdan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang mengembangkan cluster kawasan pariwisata dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/ peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertical pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan

sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaan parker dan sirkulasi dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Bekasi memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 Seri E tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015- 2035 telah ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Bekasi, meliputi :

- a. tujuan penataan ruang;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan subbagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya,

serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan lain- lain.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan dijelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2015-2035, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya system perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota diseluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota. Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar keseluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air

limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Penataan pola ruang yang menyangkut wilayah Kecamatan Bekasi Selatan adalah Kawasan Lindung karena memiliki kawasan pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai yaitu kawasan sempadan Sungai/ kali Bekasi yang pemanfaatannya harus sesuai dengan pengaturan zonasi kawasan sempadan sungai/ kawasan lindung. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budi daya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa diseperti pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan dipusat kota kecamatan dan sub pusat kota kecamatan/kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman berada diseluruh kecamatan Kota Bekasi tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budi daya lainnya menyebar keseluruh Kota Bekasi.

Hal lain yang termasuk dalam penyebutan khusus Kecamatan Bekasi Selatan adalah perwujudan pengembangan kawasan strategis, yaitu dari sudut kepentingan pemanfaatan citra Kota. Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan memiliki kawasan perjuangan pada masa lalu dan pariwisata.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Bekasi umumnya dan Kecamatan Bekasi Selatan pada umumnya. Dalam arahan peraturan Zonasi Kota Bekasi tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unsurnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 3.5

Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

<b>Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Struktur Ruang Saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</b>
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator Pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait Perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi bencana di bantaran Sungai/kali Bekasi	Kawasan hunian bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai/kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam Pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam Pengurangan risiko bencana

Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara Pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnisdan Pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur Ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.
-----------------------------	---	---	---	--

Tabel 3.6  
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

<b>Rencana Pola Ruang</b>	<b>Pola Ruang Saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi</b>
Ruang terbuka Hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam kampung	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun

Kawasan perlindungan setempat di bantaran sungai/kali Bekasi	Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai /kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
--	---	---	---	--

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

<b>Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Kawasan pemukiman	Kurangnya Pemahaman terhadap tata ruang perkotaan	Pemahaman Masyarakat terhadap tata ruang masih	Peraturan terkait tata ruang

Kawasan bisnis	Kurangnya Pemantauan terhadap kebersihan lingkungan kawasan bisnis	Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan kawasan	Peraturan tentang kebersihan lingkungan
Kawasan pemukiman bantaran	Kurangnya kesadaran Sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan dan penataan kawasan Bantaran Sungai/kali Bekasi	Banyaknya warga Masyarakat di kawasan bantaran yang belum memiliki hunian yang layak	Peraturan terkait kawasan bantaran sungaid an Lembaga masyarakat pemerhati disungai

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (K/L).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *selfassessment* untuk melihat sejauh mana K yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan K/L yang dihasilkan dan

ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Bekasi dalam penyusunan RPD Kota Bekasi menyusun K/L berupa RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disertai juga penyusunan KLHS-RPD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPD agar K/L yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPD Kota Bekasi juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Bekasi, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Tidak mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah Pengaruh K dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya:

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perilaku kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/ penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Bekasi tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Bekasi. Pengaruh K/L terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. K/L juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, K/L juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisias kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko K/L yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan K/L. Dampak dan resiko dari K/L yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaanpun meningkat.

Pengaruh K/L yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika K/L diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Bekasi berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga

akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh K/L dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika K/L diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran kedepannya agar dampak negative terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kota Bekasi. Pengaruh K/L terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Bekasi apabila K/L dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh K/L terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan alias pengaruh K/L pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Bekasi ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati dilokasi tertentu di Kota Bekasi dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Tabel 3.8  
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.				
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.				
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66	Ditjen Polpum
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,50% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
	3) Indeks Kinerja Ormas.	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.				
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 -2018	67,1	67,5	Ditjen Polpum
	3) Indeks				

	Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
	4) Indeks	Nilai	Nilai	Nilai	Ditjen
	Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	2,305	2,31	2,33	Polpum
c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.					
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.					
	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	N/A	-*	150 daerah	Ditjen Bina Adwil
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.					
	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	N/A	15%	80%	BPSDM
	2) Tingkat Kapabilitas Auditor	N/A	Level 3	Level 3	Itjen

	Kementerian		-75%	-100%	
	Dalam Negeri.				
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 -75%	Level 3 -100%	Itjen
	4) Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni.	N/A	Nilai 3	Nilai 3,60	IPDN
b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.					
	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.					
	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	N/A	30%	100%	Ditjen Bina Bangda

	4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda
	5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	10%	75%	Ditjen Bina Pemdes
	6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Ditjen Bina Keuda
	7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	N/A	-*	36%	Badan Litbang
	8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	N/A	55 Daerah	165 Daerah	Badan Litbang
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.					
	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
	2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	1.623  Lembaga Pengguna	1.923  Lembaga Pengguna	3.123  Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.					
	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	Indeks Reformasi	Nilai	Nilai	Nilai	Setjen

	Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	75,43	85,01	93,01	
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
	1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	N/A	40%	65%	Badan Litbang

Renstra Kemendagri Th.2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Selatan dengan ditandatanganinya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/ pelayanan public agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).

Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan disediakan ruang bagi masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota

Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- h. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
- i. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- j. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- k. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- l. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
- m. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang- ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- n. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan

kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi:

- o. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- p. pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- q. pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- r. pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- s. pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- t. pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- u. pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- v. perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- w. pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- x. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- y. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- z. pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- aa. pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- bb. penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi

khusus tertentu dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari:

(1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi:

- a. sistem pusat pelayanan kota;
- b. sistem jaringan prasarana kota.

(2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budi daya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budi daya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruangan dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang mengembangkan cluster kawasan pariwisata dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/ peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertical pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaan parkir dan sirkulasi dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Bekasi memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewartakan sejarah dan masa depan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 Seri E tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015- 2035 telah ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Bekasi, meliputi :

- g. tujuan penataan ruang;
- h. rencana pola ruang;
- i. rencana jaringan prasarana;
- j. penetapan subbagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- k. ketentuan pemanfaatan ruang;
- l. peraturan zonasi.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan lain- lain.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan

pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan dijelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2015-2035, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya system perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota diseluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota. Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar keseluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya diwilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Penataan pola ruang yang menyangkut wilayah Kecamatan Bekasi Selatan adalah Kawasan Lindung karena memiliki kawasan pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai yaituk awasan sempadan Sungai/ kali Bekasi yang pemanfaatannya harus sesuai dengan pengaturan zonasi kawasan sempadan sungai/ kawasan lindung. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budi daya yaitu

pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa disepular pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan dipusat kota kecamatan dan sub pusat kota kecamatan/kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan pemukiman berada diseluruh kecamatan Kota Bekasi tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budi daya lainnya menyebar keseluruh Kota Bekasi.

Hal lain yang termasuk dalam penyebutan khusus Kecamatan Bekasi Selatan adalah perwujudan pengembangan kawasan strategis, yaitu dari sudut kepentingan pemanfaatan citra Kota. Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan memiliki kawasan perjuangan pada masa lalu dan pariwisata.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Bekasi umumnya dan Kecamatan Bekasi Selatan pada umumnya. Dalam arahan peraturan Zonasi Kota Bekasi tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unurnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilihat pada table dibawah ini ;

Tabel 3.5

## Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

<b>Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Struktur Ruang Saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</b>
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator Pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait Perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi bencana di bantaran	Kawasan hunian bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai/kali	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara Pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang	Kawasan bisnisdan Pemukiman dengan dukungan mana yang	Pemahaman terhadap peta struktur Ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata

Tabel 3.6

## Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

<b>Rencana Pola Ruang</b>	<b>Pola Ruang Saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan</b>
Ruang terbuka Hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberday	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Kawasan perlindungan setempat di bantaran sungai/kali Bekasi	Kawasan perlindungan setempat di bantaran	Penataan kawasan bantaran Sungai /kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Tabel 3.6  
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

<b>Rencana Pola Ruang</b>	<b>Pola Ruang Saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan</b>
Ruang terbuka Hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaa	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan
Kawasan perlindungan setempat di bantaran sungai/kali Bekasi	Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai /kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaa n masyarakat dalam	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

<b>Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Kawasan pemukiman	Kurangnya Pemahaman terhadap tata ruang perkotaan	Pemahaman Masyarakat terhadap tata ruang masih	Peraturan terkait tata ruang
Kawasan bisnis	Kurangnya Pemantauan terhadap kebersihan lingkungan	Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat	Peraturan tentang kebersihan lingkungan
Kawasan pemukiman bantaran	Kurangnya kesadaran Sebagian masyarakat terhadap	Banyaknya warga Masyarakat di kawasan bantaran yang	Peraturan terkait kawasan bantaran sungai dan Lembaga masyarakat

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan

bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (K/L).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *selfassessment* untuk melihat sejauh mana K yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan K/L yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Bekasi dalam penyusunan RPD Kota Bekasi menyusun K/L berupa RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disertai juga penyusunan KLHS-RPD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPD agar K/L yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPD Kota Bekasi juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Bekasi, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Tidak mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah Pengaruh K dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya:

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perilaku kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/ penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Bekasi tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Bekasi. Pengaruh K/L terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. K/L juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, K/L juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisias kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko K/L yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan K/L. Dampak dan resiko dari K/L yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaanpun meningkat.

Pengaruh K/L yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika K/L diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Bekasi berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh K/L dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika K/L diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran kedepannya agar dampak negative terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kota Bekasi. Pengaruh K/L terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Bekasi apabila K/L dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh K/L terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan alias pengaruh K/L pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Bekasi ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati dilokasi tertentu di Kota Bekasi dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Tabel 3.8

## Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

<b>No</b>	<b>Aspek Kajian</b>	<b>Ringkasan KLHS</b>	<b>Implikasi Terhadap Pelayanan</b>	<b>Catatan Bagi Perumusan Program dan</b>
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan sebagai Pusat perekonomian berupa perdagangan, jasa	Sering muncul bangunan dan usaha yang belum memiliki ijin. Sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk mematuhi peraturan perijinan yang	Program diarahkan pada: Penegakan perda Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Konservasi air terancam dimana Kawasan sebagai penyangga konservasi air mulai menjadi kawasan terbangun	Pelayanan pada tingkat kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan	Program diarahkan pada: Monitoring terhadap penggunaan sumber air Penataan sanitasi pemukiman
3.	Kinerja pelayanan/ jasa ekosistem	Harus ada pengaturan yang Konprehensif dan holistik	Memfokuskan pada kelestarian Ekosistem perkotaan sesuai kewenangan	Program diarahkan pada: Kajian ekosistem perkotaan dan implementasi kebijakannya

4.	Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam	Memelihara kawasan sumber air (konservasi air) dan mengatur	Pengaduan masyarakat terhadap ketersediaan sumber air tanah	Program diarahkan pada: Penyelamatan sumber air tanah di Bekasi
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan	Perubahan iklim kearah kurangnya Pemenuhan air bersih sangat tinggi tingkat ketergantungannya	Perubahan iklim yang tidak diikuti Dengan adaptasi yang baik dapat meningkatkan angka	Program diarahkan pada: Analisis perubahan iklim dan upaya penanggulangan dan adaptasinya
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Sangat perlu diversifikasi Keanekaragaman hayati terutama flora	Munculnya usulan kampung hijau, Kampung sayur dan sejenisnya	Program diarahkan pada: Diversifikasi flora dalam penghijauan kota.

Permasalahan Kecamatan Bekasi Selatan sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bekasi Selatan muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur.

Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Bogor, Kabupaten Bekasi dan Pemerintah DKI melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi saat ini adalah ketimpangan pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan.

Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan/ Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi turun dari 826 tahun 2017 menjadi 728 tahun 2018 penurunan jumlah Keluarga Pra Sejahtera sekitar 98 Keluarga atau 11,8 %.

Ada 7 Agenda pembangunan pada RPJMN tahun 2020-2024 yaitu: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; memperkuat stabilitas polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik. Berkaitan dengan agenda pembangunan nasional tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan menginisiasi Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bekasi Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien
- b) Belum sesuainya requirement jabatan dengan ASN pengisinya
- c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan
- d) Belum tersedianya data utama sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- e) Banyak usaha masyarakat yang belum optimal dalam melaksanakan usahanya
- f) Penyaluran bantuan operasional untuk pokmas yang belum tepat waktu
- g) Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam program K3

- h) Banyaknya potensi konflik yang terjadi di masyarakat baik sesama masyarakat maupun dengan pihak lainnya terutama akan memasuki musim pilkada dan pilpres
- i) Masih adanya paham radikalisme di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan
- j) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam penegakan aturan tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, keindahan serta keamanan di lingkup Kecamatan Bekasi Selatan
- k) Belum optimalnya sinergitas antara 3 pilar dengan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam penegakan ketertiban, kebersihan, keindahan serta keamanan

Isu strategis dan permasalahan pada Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Sarana dan prasarana belum lengkap	Sarana dan Prasarana penunjang belum tersedia	Sarana dan Prasarana eksisting yang sudah usang atau belum tersedia	Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien	1	Memperkuat Sarana dan Prasarana penunjang kantor	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
							2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan

<b>NO</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)</b>
								dan Pelayanan Publik
2	ASN dengan kemampuan teknis belum optimal	Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/ pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya	Permohonan permintaan ASN atau pendidikan sesuai tugas dan fungsi belum terpenuhi	Belum sesuai requirement jabatan dengan ASN pengisinya	1	Meningkatkan SDM yang berkualitas	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

<b>NO</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)</b>
3	Minat Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan Masih Rendah.	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan	Pembangunan Infrastruktur dan Aspirasi Masyarakat yang Belum Terakomodir Seluruhnya.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan	1	Pembangunan Fisik/ Sarana, Pra-sarana dan Tata Ruang	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
					2	Pembangunan Sosial-Budaya, Pemerintahan dan Kemasyarakatan		
					3	Pembangunan Ekonomi		
4	Belum tersedianya data valid	Setiap leading sektor mempunyai data sendiri yang berbeda-	Belum tersedianya data utama	Belum tersedianya data utama sebagai	1	Memperkuat Sarana dan Prasarana	1	Program Pemberdayaan Masyarakat

<b>NO</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)</b>
	terkait demografi di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	beda (contoh: BPS, Dukcapil, KPU, dll)	sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	rujukan pelaksanaan kegiatan pemerintahan		penunjang kantor		Desa dan Kelurahan
							2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	Ketimpangan kondisi ekonomi warga di wilayah	Masih banyak warga miskin di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Kurangnya fasilitas pengembangan	Banyak usaha masyarakat yang belum optimal dalam	1	Pembangunan Ekonomi	1	Program Pemberdayaan Masyarakat

<b>NO</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)</b>
	Kecamatan Bekasi Selatan		ekonomi masyarakat	melaksanakan usahanya				Desa dan Kelurahan
6	Belum optimalnya pokmas di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Pelayanan yang dilaksakan pokmas (contoh:posyandu, pkk, rt, rw) belum optimal	Bantuan operasional yang cenderung lambat ter distribusikan	Penyaluran bantuan operasional untuk pokmas yang belum tepat waktu	1	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan jaminan pemerataan	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
7	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pembuangan	Masih adanya titik banjir di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Selain karena wilayah kelurahan Jakasetia bersebelahan dengan kali	Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam program K3	1	Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

<b>NO</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)</b>
	sampah dan pengelolaannya		Bekasi, juga karena masih banyak sampah yang belum terkelola					
							2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8	Potensi adanya konflik di masyarakat	Kurang optimalnya pemetaan potensi masalah	Intensitas sinergitas forkopimcam	Banyaknya potensi konflik yang terjadi di	1	Memperkuat stabilitas Politik, hukum dan hak	1	Program Penyelenggaraan Urusan

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO	PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)
			yang masih kurang	masyarakat baik sesama masyarakat maupun dengan pihak lainnya terutama akan memasuki musim pilkada dan pilpres		asasi manusia dan transformasi pelayanan publik		Pemerintahan Umum
							2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

<b>NO</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)</b>
9	Potensi paham radikalisme	Kurangnya pemahaman tentang kewarganegaraan dan pengamalan pancasila	Intensitas penyuluhan wawasan kebangsaan yang kurang	Masih adanya paham radikalisme di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	1	Memperkuat stabilitas Politik, hukum dan hak asasi manusia dan transformasi pelayanan publik	1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
10	Masih adanya bangunan liar spanduk liar dan Pedangan Kaki Lima (PKL) di	Bangunan Liar dan PKL masih sulit dikendalikan meskipun telah dilakukan upaya penanganan/eksekusi	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam penegakan aturan tentang	1	Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO	PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)
	wilayah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi	oleh aparaturn Kecamatan (Trantib), Kelurahan dan Satpol PP	Umum, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun	penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, keindahan serta keamanan di lingkup Kecamatan Bekasi Selatan				
		Adanya Penyalahgunaan Lahan PSU di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang seharusnya	Belum optimalnya sinergitas antara 3 pilar dengan pemangku kepentingan				

NO	AKAR MASALAH	MASALAH	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS	NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO	PROGRAM PRIORITAS (sesuai Nomenklatur Permendagri No.90 Tahun 2019)
			telah mengatur mengenai sanksi belum dapat ditegakkan sesuai klausul yang telah tertuang.	lainnya yang terkait dalam penegakan ketertiban, kebersihan, keindahan serta keamanan				

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bekasi Selatan.**

Guna menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Bekasi Selatan yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bekasi Selatan 5 (lima) tahun kedepan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bekasi Selatan Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bekasi Selatan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu: “ **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Selatan dan Mewujudkan Kecamatan Bekasi Selatan yang aman dan nyaman**”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai AKIP Kecamatan Kecamatan Bekasi Selatan dimana sasarannya adalah Meningkatnya Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan.

##### Rumusan Indikator Tujuan

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka indikator sasaran dari tujuan dimaksud ada 2, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan dimana Indeks kepuasan layanan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat/Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima warga masyarakat dari Pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dalam melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu 5 tahun meningkat dari 75 menjadi 80 (100%). Dengan kata lain Indeks yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui prosentase kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Sementara pemberdayaan masyarakat akan tercapai saat lembaga terkait pemberdayaan masyarakat aktif. Persentase capaian dihitung dari jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi dengan jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada dikali 100 %.

#### **4.1.2.Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan Sasaran sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TERGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
			(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(12)
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai Capaian Zona Intagritas	40	40	40	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan Indeks Kepuasan Masyarakat	76	76.5	77
								82	82.2 5	82.5

2.	Mewujudkan Kecamatan Bekasi Selatan yang Aman dan Nyaman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum	6%	5%	4.5%	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	5%	6%	7%
----	--	---	----	----	------	--	---------------------------------------	----	----	----

Tabel.4.2

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kecamatan Bekasi Selatan  
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai Capaian Zona Intagritas	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	76	76.5	77

				Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>IKM dihitung berdasarkan hasil Survey</p> <p>Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.</p> <p>Penerima layanan Kecamatan Bekasi Selatan adalah masyarakat yang menerima dayanan.</p>	82	82.25	82.5
--	--	--	--	----------------------------	---	----	-------	------

2.	Mewujudkan Kecamatan Bekasi Selatan yang Aman dan Nyaman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	( Jumlah Zonasi baru K3 yang Baik – Jumlah zonasi k3 yang baik eksisting / Jumlah Seluruh Zonasi K3 ) x 100 %	5%	6%	7%
----	--	---	--	---------------------------------------	---	----	----	----

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program-prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bekasi Selatan menunjukkan bagaimanacara Kecamatan Bekasi Selatan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Selatan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keteladan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Selatan	Meningkatnya Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan	Peningkatan pelayanan dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat</li> <li>b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</li> <li>c. Meningkatkan partisipasi Masyarakat</li> </ul>
Mewujudkan Kecamatan Bekasi Selatan yang Aman dan Nyaman	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Peningkatkan Keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan bekerjasama dengan 3 pilar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memaksimalkan fungsi 3 pilar untuk keamanan wilayah</li> <li>b. Meningkatkan kenyamanan hidup dengan fasilitas penunjuang</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi meliputi:

a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator

- Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Optimalisasi Peningkatan Kapasitas aparatur
- Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
- Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantora

Mempunyai 6 Sub Kegiatan dengan 22 Sub Kegiatan, yaitu

1. Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pelaksanaan pembangunan daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  - 6) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 7) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
  - 8) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi umum perangkat daerah
  - 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 10) Penyediaan peralatan dan mesin lainnya
  - 11) Penyediaan bahan logistik kantor
  - 12) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
  - 13) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - 14) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - 15) penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
  - 16) Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- 17) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
  - 18) penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- 19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 21) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - 22) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator:
- Persentase Jumlah Kelembagaan yang aktif
- Mempunyai 2 Kegiatan dengan 19 Sub Kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekayonjaya
    - 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayuringinjaya
    - 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakasetia

- 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakamulya
- 6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margajaya
- 7) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 8) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekayonjaya
- 9) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayuringinjaya
- 10) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasetia
- 11) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakamulya
- 12) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margajaya
- 13) Evaluasi Kelurahan

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 14) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pekayonjaya
- 15) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuringinjaya
- 16) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakasetia
- 17) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakamulya
- 18) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Margajaya
- 19) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator

- Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan masyarakat

Mempunyai 2 kegiatan dengan 7 Sub Kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
  - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum

- 2) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- 3) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Pekayonjaya
- 4) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kayuringinjaya
- 5) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasetia
- 6) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakamulya
- 7) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Margajaya

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator

- Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat

Mempunyai 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 2) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator:

- Persentase wilayah tertib K3

Mempunyai 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Ada penambahan 1 sub kegiatan pada program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yaitu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub kegiatan tersebut ditujukan untuk Tindakan prefentive terhadap paham liberalisme dengan memberikan pemahaman kebangsaan pada masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan.

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dibawah ini pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Kinerja Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>KECAMATAN BEKASI SELATAN</b>							<b>33.362.698.000</b>		<b>40.017.237.600</b>		<b>48.020.685.120</b>		<b>48.020.685.120</b>		
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bekasi Selatan				Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	75	76	33.262.698.000	77	39.897.237.600	78	47.876.685.120	78	47.876.685.120		
	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah				100%	100%	23.007.698.000	100%	27.609.237.600	100%	33.131.085.120	100%	33.131.085.120		
			Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	23.007.698.000	100%	27.609.237.600	100%	33.131.085.120	100%	33.131.085.120		

				Optimaliasi Peningkatan Kapasitas aparatur	100%	100%		100%		100%		100%	-		
				Optimaliasi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%		100%		100%		100%	-		
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantora	100%	100%		100%		100%		100%	-		
			Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	3.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000		

			Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	3.000.000	14 Dokumen	50.000.000	14 Dokumen	75.000.000	14 Dokumen	75.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	11.500.502.200	100%	13.550.000.000	100%	16.075.000.000	100%	16.075.000.000		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang	58 Orang	11.497.502.200	58 Orang	13.500.000.000	58 Orang	16.000.000.000	58 Orang	16.000.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	3.000.000	14 Laporan	50.000.000	14 Laporan	75.000.000	14 Laporan	75.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Pengadaan mesin lainnya	Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	220.000.000	100%	300.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000		
			Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	220.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	450.000.000	1 Paket	450.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	260.000.000	100%	550.000.000	100%	760.000.000	100%	760.000.000		

			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	150.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	10.000.000	2 Orang	150.000.000	2 Orang	210.000.000	2 Orang	210.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	100.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	250.000.000	50 Orang	250.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	682.500.000	100%	1.300.000.000	100%	1.860.000.000	100%	1.860.000.000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya

			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	262.500.000	3 Paket	400.000.000	3 Paket	550.000.000	3 Paket	550.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	60.000.000	2 Paket	250.000.000	2 Paket	325.000.000	2 Paket	325.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	150.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Kali	120 Kali	215.000.000	120 Kali	250.000.000	120 Kali	350.000.000	120 Kali	350.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	5.000.000	50 Dokumen	100.000.000	50 Dokumen	200.000.000	50 Dokumen	200.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya

			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	9.686.695.800	100%	11.009.237.600	100%	12.691.085.120	100%	12.691.085.120		
			penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	331.448.600	12 Laporan	509.237.600	12 Laporan	691.085.120	12 Laporan	691.085.120	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.355.247.200	12 Laporan	10.500.000.000	12 Laporan	12.000.000.000	12 Laporan	12.000.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya

			pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	655.000.000	100%	850.000.000	100%	1.220.000.000	100%	1.220.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	90.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	200.000.000	33 Unit	250.000.000	33 Unit	350.000.000	33 Unit	350.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya

			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	80.000.000	50 unit	150.000.000	50 unit	220.000.000	50 unit	220.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	285.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
	Meningkatnya Layanan Publik		Masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	10.255.000.000	100%	12.288.000.000	100%	14.745.600.000	100%	14.745.600.000		
	dan Pemberdayaan	dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan													
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan yang aktif	100%	100%	9.715.000.000	100%	11.658.000.000	100%	13.989.600.000	100%	13.989.600.000		

			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	9.435.000.000	100%	11.183.000.000	100%	13.313.600.000	100%	13.269.600.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Masyarakat	6 Lembaga Masyarakat	120.000.000	6 Lembaga Masyarakat	180.000.000	6 Lembaga Masyarakat	240.000.000	6 Lembaga Masyarakat	201.600.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekayonjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	504.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kayuringinjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	504.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan kayuringinjaya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakasetia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	504.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Jakasetia

			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jakamulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	504.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Jakamulya
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	504.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Margajaya
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	390.000.000	7 Pokmas/Ormas	450.000.000	7 Pokmas/Ormas	504.000.000	7 Pokmas/Ormas	504.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekayonjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279 Pokmas/Ormas	279 Pokmas/Ormas	2.100.000.000	279 Pokmas/Ormas	2.300.000.000	279 Pokmas/Ormas	2.530.000.000	279 Pokmas/Ormas	2.530.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayuringinjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269 Pokmas/Ormas	269 Pokmas/Ormas	2.250.000.000	269 Pokmas/Ormas	2.500.000.000	269 Pokmas/Ormas	2.850.000.000	269 Pokmas/Ormas	2.850.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan kayuringinjaya
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakasetia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259 Pokmas/Ormas	259 Pokmas/Ormas	1.500.000.000	259 Pokmas/Ormas	1.700.000.000	259 Pokmas/Ormas	1.989.600.000	259 Pokmas/Ormas	2.016.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Jakasetia
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jakamulya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123 Pokmas/Ormas	123 Pokmas/Ormas	1.275.000.000	123 Pokmas/Ormas	1.500.000.000	123 Pokmas/Ormas	1.584.000.000	123 Pokmas/Ormas	1.584.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Jakamulya
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Margajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51 Pokmas/Ormas	51 Pokmas/Ormas	750.000.000	51 Pokmas/Ormas	953.000.000	51 Pokmas/Ormas	1.008.000.000	51 Pokmas/Ormas	1.008.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Margajaya

			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	108.000.000	12 Laporan	108.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	280.000.000	100%	475.000.000	100%	676.000.000	100%	720.000.000		
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pekayonjaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	40.000.000	2 Lembaga	75.000.000	2 Lembaga	120.000.000	2 Lembaga	100.800.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuringinjaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	40.000.000	2 Lembaga	75.000.000	2 Lembaga	85.000.000	2 Lembaga	100.800.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan kayuringinjaya
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakasetia	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	40.000.000	2 Lembaga	75.000.000	2 Lembaga	85.000.000	2 Lembaga	100.800.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Jakasetia

			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jakamulya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	40.000.000	2 Lembaga	75.000.000	2 Lembaga	85.000.000	2 Lembaga	100.800.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Jakamulya
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Margajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	40.000.000	2 Lembaga	75.000.000	2 Lembaga	85.000.000	2 Lembaga	100.800.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Margajaya
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	216.000.000	12 Laporan	216.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan masyarakat	100%	100%	475.000.000	100%	570.000.000	100%	684.000.000	100%	684.000.000		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%	85.000.000	100%	180.000.000	100%	216.000.000	100%	216.000.000		



			<p>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Pekayonjaya</p> <p>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</p>	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	72.000.000	12 Dokumen	72.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
			<p>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Kayuringinjaya</p> <p>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</p>	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	72.000.000	12 Dokumen	72.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan kayuringinjaya

			<p>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakasetia</p> <p>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</p>	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	72.000.000	12 Dokumen	72.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Jakasetia
			<p>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jakamulya</p> <p>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</p>	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	72.000.000	12 Dokumen	72.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Jakamulya

			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Margajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	72.000.000	12 Dokumen	72.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Margajaya
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000		

			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	72.000.000	12 Dokumen	72.000.000	Kecamatan Bekasi Selatan	Kelurahan Pekayonjaya
Mewujudkan Kecamatan Bekasi Selatan yang Aman dan Nyaman							100.000.000		120.000.000		144.000.000		144.000.000		
	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat				100%	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	144.000.000	100%	144.000.000		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib K3	100%	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	144.000.000	100%	144.000.000		



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir
			2024	2025	2026	
1	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100 %	100 %	100 %	100%
2	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas aparatur	100%	100 %	100 %	100 %	100%
3	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%	100 %	100 %	100 %	100%
4	Optimalisasi Pelayanan	100%	100 %	100 %	100 %	100%

5	Persentase Jumlah Kelembagaan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
6	Capaaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase wilayah tertib K3	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel diatas dapat dilihat indikator-indikator darai beberapa program di Kecamatan Bekasi Selatan

1. Untuk indikator Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berkontribusi dalam penyediaan dokumen-dokumen terkait keuangan seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dan laporan keuangan baik bulanan, triwulan, semesteran ataupun tahunan.
2. Indikator Optimaliasi Peningkatan Kapasitas aparatur ditujukan untuk aparatur yang ada di lingkup Kecamatan Bekasi Selatan untuk lebih mengoptimalkan SDM yang ada menjadi aparatur yang kompeten.
3. Pada indikator Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur ditujukan untuk pemenuhan pemeliharaan barang milik negara sehingga pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilaksanakan secara optimal.
4. Terdapat administrasi-administrasi perkantoran pada Kecamatan Bekasi Selatan yang diharapkan akan dikontribusikan dengan indikator Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran.
5. Persentase Jumlah Kelembagaan yang aktif merupakan indikator yang didapat dari keaktifan Lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan seperti, RT, RW, posyandu, PKK, dll.

6. Indikator Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan masyarakat dilaksanakan setahun 2 kali atau tiap semester sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan membuat rencana tindak lanjut terkait indeks kepuasan masyarakat yang didapatkan dari kuisioner ke masyarakat.
7. Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat merupakan indikator yang diharapkan dapat memberikan Tindakan preventif terhadap perselisihan dilingkup Kecamatan Bekasi Selatan dan paham-paham radikalisme.
8. Untuk indikator Persentase wilayah tertib K3, Kecamatan Bekasi Selatan berkontribusi 100% melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bekasi Selatan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi selatan dalam Renstra telah selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi selatan Kota Bekasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bekasi selatan Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kota Bekasi, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan

kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel sehingga dalam implementasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana

rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan pada saat merumuskan rencana strategis instansi. Dalam hal ini masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah yang juga sebagai penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya memiliki peran dalam mewujudkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bekasi selatan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bekasi selatan.



Bekasi,  
**CAMAT BEKASI SELATAN**

**KARYA SUKMAJAYA, S.AP., M.Si.**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19720402 199901 1 001